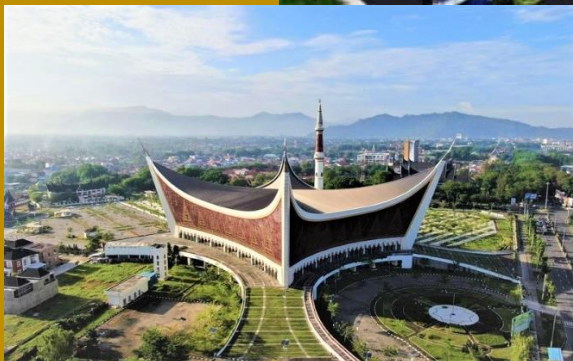




Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pencapaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LKjIP ini dapat menjadi cermin pembanding bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2023, sekaligus sebagai alat pemacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Padang, Januari 2024

Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

ERASUKMA MUNAF, ST.MM.MT

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19720925 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Visi tersebut yakni sebagai **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**, yang merupakan bagian dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD-P sebesar **Rp. 335.188.071.338,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 315.617.343.629,- (94,16%)** yang mempunyai 9 (sembilan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan pada APBD-P.

**Pagu Dana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Langsung	335.188.071.338,-	315.617.343.629,-	650.805.414.967,-	94,69%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2023 terdapat 9 (Sembilan) program dan 19 Kegiatan serta mempunyai 103 (Seratus Tiga) Sub Kegiatan. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi/keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas BMCKTR Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	REALIASI TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	73.70%	88.50 %
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio kemantapan jalan	77 %	67.99 %
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84 %	85.58 %
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84 %	84.95 %
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis terbangun	6 %	6 %
7.	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan Berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	87.00 %	88 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas BMCKTR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas BMCKTR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai perwujudannya perlu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di suatu wilayah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang

ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Tata cara penyusunan LAKjIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Nomor 50 Tahun 2020 sebelumnya yang bernama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pergub Nomor: 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diketahui bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah.

2. Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
3. Penyelenggaraan Administrasi Dinas.
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dinas dengan fungsinya masing-masing.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
- c. Penyelenggaraan Administrasi Dinas.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan ketatausahaan, penganggaran, data/informasi, keuangan, kepegawaian, aset, arsip dan tata laksana organisasi serta pembinaan/pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

2. Penyelenggaraan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
4. Penyelenggaraan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan
5. Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
7. Penyelenggaraan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
8. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas yang
9. Menjadi tanggung jawab Dinas;
10. Penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
11. Penyelenggaraan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi Berbasis komputerisasi/web;
12. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Sub Bagian Tata Usaha;***

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan program kerja, anggaran dan kebijakan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pelaksanaan pengelolaan perencanaan pembinaan dan pengembangan karir kepegawaian;
3. Penyelenggaraan pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian meliputi kepangkatan, penghargaan dan kelengkapan administrasi kepegawaian lainnya;
4. Penyelenggaraan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Penyelenggaraan pengelolaan tata kearsipan Dinas;

6. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas meliputi urusan kebersihan, keamanan, ketertiban dan penataan/perbaiki utilitas sarana dan prasarana kantor;
7. Pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pengadministrasian barang milik daerah;
8. Penyelenggaraan urusan humas dan rumah tangga Dinas;
9. Penyelenggaraan pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan meliputi lingkup verifikasi, pembukuan, perpajakan, pengelolaan gaji dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan Pembangunan dan preservasi jalan/jembatan, pengamanan bagian – bagian jalan/jembatan, pengawasan/pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan/preservasi jalan/jembatan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan/preservasi jalan/jembatan dengan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan, penetapan laik fungsi jalan/jembatan dan penyiapan rumusan kebijakan, norma dan pedoman serta pelaporan berkaitan pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar atau pedoman teknis pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan/jembatan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan/ jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat atas pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan/jembatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan preservasi jalan/jembatan, penetapan audit keselamatan jalan/jembatan, evaluasi pemanfaatan peralatan/bahan jalan dan pengamanan bagian-bagian jalan/jembatan.

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar atau pedoman teknis pelaksanaan preservasi konstruksi jalan/jembatan;

- c. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan preservasi konstruksi jalan/jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat atas pelaksanaan preservasi jalan/jembatan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada bagian jalan dan daerah milik jalan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan survey, kajian, evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan/jembatan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan survey, kajian dan membuat perhitungan teknis untuk melaksanakan rencana pengamanan pada bagian-bagian manfaat badan jalan/jembatan atau daerah milik jalan/jembatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pemulihan kondisi jalan/jembatan akibat bencana alam;
- i. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan preservasi konstruksi jalan/jembatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;

- c. Melaksanakan kebijakan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keciptakaryaan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bidang Cipta Karya dengan Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur Pembangunan Bidang Cipta Karya pada kawasan strategis provinsi;
- h. Penyelenggaraan pemberian bantuan teknis terhadap perangkat daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
- j. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman***

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota, sampah regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota.

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan system Penyediaan air minum, sampah regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;

- Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pembangunan konstruksi sistem penyediaan air minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pembangunan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota pada pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, sampah, air limbah dan drainase;
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah.

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, Pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;

- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan Pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, Pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota pada pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan strategis dan lintas daerah;
- f. Pelaksanaan pendampingan dan bantuan teknis terhadap Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah dan pembangunan di bidang keciptakarya pada Kawasan khusus/strategis atau lintas Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
- h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman Kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kerja, anggaran dan rumusan kebijakan bidang Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Penyelenggaraan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan pembentukan Forum Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang***

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, pembinaan penataan ruang provinsi, kabupaten dan kota serta kelembagaan penataan ruang provinsi.

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penyelenggaraan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- f. Pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;

- h. Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- i. Penyelenggaraan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- k. Melaksanakan integrasi RTRW Provinsi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi;
- l. Melaksanakan proses penetapan Peraturan Daerah RTRW Provinsi;
- m. Pelaksanaan penyediaan pusat data dan informasi penataan ruang yang terdiri dari perda, dokumen penataan ruang dan data spasial;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Tingkat pencapaian penyelenggaraan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ ***Seksi Pengendalian Tata Ruang***

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi.

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang;
- g. Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif sesuai kewenangan provinsi;
- h. Pelaksanaan pengenaan sanksi sesuai kewenangan Provinsi;
- i. Pelaksanaan penyelesaian sengketa penataan ruang;
- j. Pelaksanaan monitoring pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 % (dua puluh persen) dari luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
4. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. UPTD P2BG

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Seksi Layanan Data dan Informasi

5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
4. Seksi Workshop dan Perbekalan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.

- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Jalan dan Jembatan I
4. Seksi Jalan dan Jembatan II
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

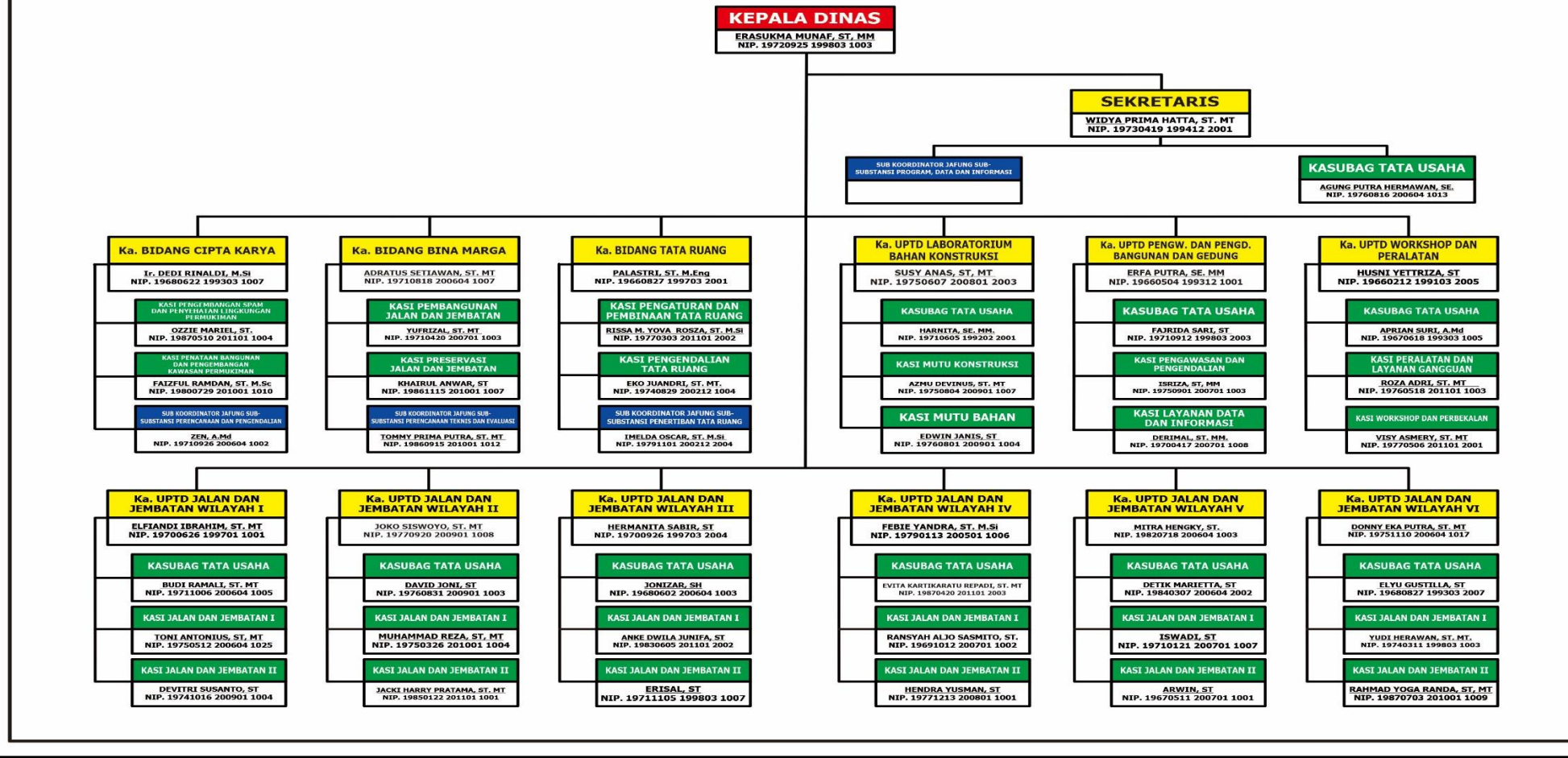
1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 ditampilkan pada *Gambar 1.1*.

Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2023 terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II (1 orang)
2. Sekretaris : Eselon III (1 orang)
3. Kepala Bidang : Eselon III (3 orang)
4. Kepala UPTD : Eselon III (9 orang)
5. Kepala Seksi : Eselon IV (27 orang)
6. Kasubag : Eselon IV (11 orang)

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas BMCKTR tahun 2023

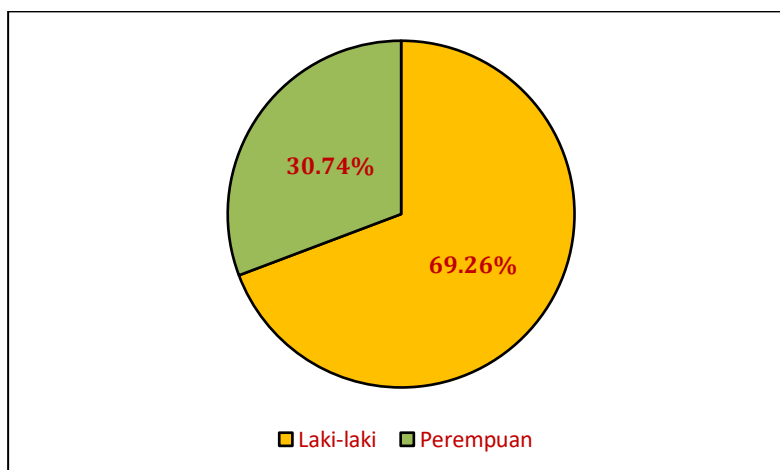
1.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data akhir Tahun 2023 sebanyak 309 (Tiga Ratus Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada *tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	214 orang	69.26 %
Perempuan	95 orang	30.74 %

Sumber : Subbag TU Dinas BMCKTR



Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas BMCKTR berdasarkan kelamin Tahun 2023

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada *tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	2		2
SLTP Sederajat	5		5
SLTA Sederajat	72	9	81
DIII	24	12	36
DIV	1		1
S1	78	49	127
S2	33	24	57
Jumlah	215	94	309

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas BMCKTR

Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada *tabel 1.3*

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1a			
1b			
1c			
1d	2		2
2a	1		1
2b	9		9
2c	15	1	16
2d	32	5	37
3a	48	21	69
3b	41	17	58
3c	21	13	34
3d	28	27	55
4a	11	5	16
4b	2	2	4
4c	1		1
4d			
4e			
PPPK	3	4	7
Jumlah	214	95	309

Sumber : Subbag TU Dinas BMCKTR

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas

ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2023, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kawasan Museum dan Monumen PDRI serta Perencanaan Penataan Ruang RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak. Selain itu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penyusunan Ranperkada Danau Prioritas di Sumatera Barat.

Adapun program-program Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan misi Gubernur yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas BMCKTR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih

terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran (2) kemantapan jalan provinsi tahun 2023 terjadi penurunan capaian jalan mantap dikarenakan perubahan SK Jalan tahun 2023.

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota. (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) Terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

1.4 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP 2023
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	Merumuskan kembali dan melakukan analisis kelayakan beberapa indikator kinerja sehingga dapat menggambarkan kondisi kinerja sehingga dapat dicapai antara lain: a. Persentase Bangunan Strategis Terbangun. b. Persentase Penataan Bangunan Pada Kawasan Strategis. c. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi.	Capaian kinerja pada persentase bangunan strategis terbangun, persentase penataan bangunan pada kawasan strategis dan Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi telah dianalisis dan dirumuskan kembali. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja Dinas jika revisi RPJMD telah dilakukan.	Indikator yang dirumuskan kembali telah masuk ke dalam Revisi RPJMD (Bappeda), Renstra, Renja, IKU	Tahun 2024	Bappeda, Biro Organisasi & Dinas BMCKTR (Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang)	Perbaikan
2.	Menyusun aktifitas dalam rencana aksi sesuai dengan tingkat secara berjenjang sampai level individu	Dinas BMCKTR telah melakukan Rencana Aksi terhadap target dan capaian pada Sistem E-Sakip Pemprov secara berjenjang.	Rencana aksi telah disusun sampai dengan level individu	Maret 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
3.	Merumuskan target yang menantang, realistis dan dapat dicapai terutama pada indikator sebagai berikut: a. Rasio Kemantapan Jalan b. Persentase Bangunan Strategis Terbangun c. Persentase Penataan Bangunan Pada Kawasan Strategis	Target indikator kinerja pada Rasio Kemantapan Jalan, Persentase Bangunan Strategis Terbangun, Persentase Penataan Bangunan Pada Kawasan Strategis telah dirumuskan kembali. Target indikator tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja Dinas jika revisi RPJMD telah dilakukan.	Target Indikator yang dirumuskan kembali telah masuk ke dalam Revisi RPJMD (Bappeda), Renstra, Renja, IKU	Tahun 2024	Bappeda, Biro Organisasi & Dinas BMCKTR (Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang)	Perbaikan
4.	Meningkatkan Komitmen seluruh unit kerja/bidang/sub bidang dan seluruh pegawai atas pencapaian target kinerja.	Komitmen pencapaian target kinerja bagi seluruh pegawai sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja (PK)	Tersusunnya Perjanjian Kinerja dan IKI	Februari 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai

5.	Melakukan Pemantauan Rencana Aksi setiap bulan yang dituangkan dalam notulen rapat meliputi pembahasan target, pembahasan hambatan dan kendala yang di hadapi , arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktifitas serta dilakukan secara berjenjang. Bukti berupa notulen rapat – rapat pembahasan dibidang, sub bidang sampai level individu	Bidang/UPTD telah menyusun Rencana Aksi setiap bulannya dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas	Rencana Aksi sudah dilaporkan pada sistem e-SAKIP Sumbar dan e-SAKIP Menpan	Maret – Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
6.	Melakukan perbaikan / penyempurnaan yang signifikan terhadap dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelum mewujudkan kondisi yang lebih baik	Capaian kinerja telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja Dinas jika revisi RPJMD telah dilakukan.	Indikator yang dilakukan perbaikan dan penyempurnaan telah masuk ke dalam Revisi RPJMD	Tahun 2024	Bappeda, Biro Organisasi & Dinas BMCKTR (Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang)	Perbaikan
7.	Melakukan perbaikan definisi operasional atau merumuskan indikator yang tepat sehingga jelas cara mengukur kinerja yang ditetapkan sehingga dapat dicapai, yaitu pada indikator sebagai berikut: a. Persentase Bangunan Strategis terbangun b. Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	Definisi operasional atau indikator pada persentase bangunan strategis terbangun dan persentase penataan bangunan pada kawasan strategis telah diperbaiki dan dirumuskan kembali. Jika revisi RPJMD telah dilakukan maka definisi operasional yang telah diperbaiki dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja Dinas	Definisi operasional atau indikator yang telah diperbaiki telah masuk ke dalam Revisi RPJMD (Bappeda), Renstra, Renja, IKU	Tahun 2024	Bappeda, Biro Organisasi & Dinas BMCKTR (Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang)	Perbaikan
8.	Merumuskan mekanisme yang jelas dalam pengumpulan data kinerja sehingga dapat diketahui mencapai kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja yang telah dirinci hingga ke individu masing-masing staf sehingga perhitungan kinerja hingga ke atas dapat lebih jelas untuk dijabarkan	Tersusunnya Perjanjian Kinerja seluruh pegawai dengan target kinerja yang tepat	Maret 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai

9.	Rumusan Formula yang disajikan harusnya selaras dengan indikator dan memadai untuk memberikan penjelasan terkait penghitungan indikator.	Perbaikan rumusan formula Indikator akan dilakukan agar perhitungan indikator dapat selaras dan memadai	Perbaikan IKU	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
10.	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala pada seluruh unit kerja secara berjenjang sampai level individu	Bidang/UPTD telah menyusun Rencana Aksi setiap bulannya dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas.	Rencana Aksi sudah dilaporkan pada sistem e-SAKIP Sumbang dan e-SAKIP Menpan	Maret – Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
11.	Memastikan capaian kinerja telah meningkat atau lebih baik dari tahun sebelumnya.	Bidang/UPTD telah menyusun Rencana Aksi setiap bulannya dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkala dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas.	Rencana Aksi sudah dilaporkan pada sistem e-SAKIP Sumbang dan e-SAKIP Menpan	Maret – Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
12.	Melakukan pemantauan pada setiap level organisasi atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Dinas BMCKTR telah melakukan pemantauan terhadap target dan capaian pada Sistem E-Sakip Pemprov secara berjenjang.	Rencana aksi telah disusun sampai dengan level individu	Maret 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
13.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	Mengefektifkan penggunaan e-Sakip Sumbang, e-Sakip Menpan, Simbangda, Sakato Plan dan sistem pengumpulan data lainnya	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
14.	Pengukuran kinerja seharusnya menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan yang diterapkan dalam bentuk penggunaan aplikasi madani Sumbang	Seluruh Pegawai menginputkan realisasi kinerja pada aplikasi madani	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses

15.	Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	Telah dilakukan evaluasi pencapaian kinerja eselon III, Eselon IV, dan Staf serta evaluasi IKI dan akan menerapkan pemberian Reward and Punishment	Kinerja yang dilaporkan mengalami peningkatan dari kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya	Maret 2023-Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Pelaksanaan
16.	Pengukuran Kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi.	Telah dilakukan evaluasi pencapaian kinerja eselon III, Eselon IV, dan Staf serta evaluasi IKI dan akan menerapkan pemberian Reward and Punishment	Kinerja yang dilaporkan mengalami peningkatan dari kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya	Maret 2023-Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Pelaksanaan
17.	Pengukuran kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas dalam mencapai kinerja.	Telah dilakukan evaluasi pencapaian kinerja eselon III, Eselon IV, dan Staf serta evaluasi IKI dan akan menerapkan pemberian Reward and Punishment	Kinerja yang dilaporkan mengalami peningkatan dari kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya	Maret 2023-Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Pelaksanaan
18.	Melakukan Perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dan menyajikan berupa data riil, tidak hanya berupa narasi.	Akan melakukan perhitungan kembali efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, program dan kegiatan	Pembagian kerja sampai dengan level staf berdasarkan Cascading	Maret 2023-Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Pelaksanaan
19.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan. Analisis dan Evaluasi yang disajikan seharusnya menceritakan capaian kinerja secara memadai serta dilengkapi data kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja telah dilakukan perbaikan	LKJ telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai

20.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan secara lengkap analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Informasi yang disajikan baru berupa perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target renstra 2022, serta menyajikan perbandingan dengan target renstra tahun – tahun sebelumnya dan prediksi kemampuan mencapai target akhir periode renstra.	Dokumen Laporan Kinerja telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja secara lengkap sesuai dengan target Renstra.	LKJ dan Renstra telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
21.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	Dokumen Laporan Kinerja telah dilakukan perbaikan sesuai realisasi kinerja tahun sebelumnya	LKJ telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
22.	Dokumen Laporan kinerja agar seharusnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Dokumen Laporan Kinerja telah dilakukan perbaikan dengan menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dari realisasi kinerja di level nasional dan Provinsi lain (Benchmark Kinerja).	LKJ telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
23.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatanannya.	Dokumen Laporan Kinerja telah dilakukan perbaikan dengan menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatanannya.	LKJ telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
24.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja telah dilakukan perbaikan dengan menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	LKJ telah memuat informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai

25.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktifitas dan anggaran untuk mencapai kinerja.	Mengefektifkan penggunaan e-Sakip Sumbang, e-Sakip Menpan, Simbangda, Sakato Plan dan sistem pengumpulan data lainnya	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
26.	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Tim SAKIP menindak lanjuti catatan Hasil Evaluasi SAKIP dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Pimpinan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.	Pegawai memahami dan peduli terhadap kinerja.	Maret - Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Selesai
27.	Melakukan pemantauan Kinerja Internal harus dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja secara berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktifitas, strategis dan kebijakan dan dilakukan rutin setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.	- Melakukan pemantauan sasaran dan capaian target kinerja, dan Melakukan evaluasi melalui rapat bulanan. - Melaksanakan dan menindaklanjuti sesuai rekomendasi LHE.	Kinerja internal mengalami peningkatan dari kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya	Maret - Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
28.	Melaksanakan pemantauan kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang sampai level individu.	Evaluasi telah dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat eselon IV, eselon III hingga Kepala Dinas melalui rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan	Kinerja internal mengalami peningkatan dari kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya	Februari - Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
29.	Melaksanakan Pemantauan Capaian Kinerja sesuai SOP yang ditetapkan.	Dokumen SOP Pemantauan Capaian Kinerja telah disusun dan akan lebih mengoptimalkan komitmen terhadap tahapan yang tertuang dalam SOP tersebut.	Terpantaunya kinerja seluruh pegawai sesuai dengan SOP	Januari - Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
30.	Melaksanakan Pemantauan Capaian Kinerja Internal Oleh SDM yang Memadai	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah disusun sesuai dengan kapasitas SDM yang dimiliki	Terpantaunya kinerja seluruh pegawai	Januari - Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses

31.	Pemantauan Capaian Kinerja Internal agar memanfaatkan Teknologi Informasi	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi Simbangda dan Dashboard Pembangunan	Informasi capaian kinerja tersajikan secara real time pada sistem informasi tersebut	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
32.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan oleh APIP seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.	Melaksanakan dan menindaklanjuti sesuai rekomendasi LHE agar lebih efisien dan efektif dalam perbaikan dan peningkatan kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD pada tahun berikutnya	Tahun 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses
33.	Melaksanakan Upaya peningkatan implementasi SAKIP dari tahun – tahun sebelumnya.	- Melakukan pemantauan sasaran dan capaian target kinerja, dan Melakukan evaluasi melalui rapat bulanan. - Melaksanakan dan menindaklanjuti sesuai rekomendasi LHE.	Kinerja internal mengalami peningkatan dari kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya	Maret - Desember 2023	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang/UPTD	Dalam Proses


 ERASUKMA MUNAF, ST, MM
 NIP. 19720925 1980 1 003

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Peran Strategis

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan”**.

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayas saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS ABK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas;

Peran strategis di dalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 6 Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada tabel berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfrastruktur jalan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur Pelayanan Dasar dan Bangunan Gedung Strategis

4. Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kinerja organisasi (tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel).
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait konektivitas-aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan					
MISI 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
Tewujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi
				2	Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi
		2	Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis	3	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah
		3	Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	4	Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
	Meningkatkan infrastruktur	1	Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	1	Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis

	pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian				
				2	Penataan bangunan dan lingkungan
				3	Pembangunan SPAM Regional
				4	Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional
				5	Pembangunan Drainase primer
				6	Pembangunan IPLT Regional
	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	1	Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang berkualitas	1	Penyusunan RTR Provinsi dan fasilitasi penyusunan RRTR Kab/Kota
				2	Pembinaan perencanaan tata ruang
		2	Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang	1	Pengendalian pemanfaatan ruang
				2	Penyusunan regulasi RTR tingkat provinsi (Perda, Pergub)
				3	Penyebaran informasi perencanaan tata ruang
				4	Peningkatan pengelolaan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 73.53%	BB 73.60%	BB 73.70%	BB 73.80%	BB 73.90%	BB 74.00%	BB 74.00%
2	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	73.53%	73.60%	73.70%	73.80%	73.90%	74.00%	74.00%
3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	73.92%	75%	77%	79%	81%	82%	82%
4	Akses Air Minum layak	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
5	Akses Sanitasi Layak	80.04%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
6	Persentase bangunan strategis terbangun	38.05%	40.22%	55.55%	66.67%	83.33%	100%	100%
7	Persentase penataan bangunan pada kawasan strategis	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%
8	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	84%	86%	87%	88%	89%	90%	90%

Sumber : Rencana Startegis 2021 - 2026

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang KePU-an lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini Visi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Sumatera Barat madina yang unggul dan berkembang”**.

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air minum yang layak, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Perencanaan Kinerja Dinas BMCKTR pada dasarnya mengacu pada dokumen RPJMD (2021-2026) dan visi misi Kepala Dinas yang diturunkan dari Visi-Misi Gubernur. Adapun Perencanaan Kinerja Dinas BMCKTR Tahun 2022 ditunjukkan.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	74%
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77,00%
4	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84,00%
5	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84,00%
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	1 Presentase Bangunan Strategis terbangun	56,00%
		2 Presentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	40,00%
7	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	87,00%

Perencanaan Kinerja berisikan target dan indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang ingin dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan perencanaan kinerja tersebut maka dibuat Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) sebagai bentuk komitmen antara Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) mencakup semua program kegiatan yang ada pada dinas untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada awal Tahun 2023.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73.70 %
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses Air Minum Layak	84%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses Sanitasi Layak	84%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	(1) Persentase bangunan strategis terbangun (2) Persentase Penataan bangunan pada Kawasan Strategis	55.55% 40%
7	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	87%

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.882.890.833	
II	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.796.302.225	
III	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	622.312.600	
IV	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	411.915.480	
V	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	518.145.500	
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	81.548.698.507	
VII	Penataan Bangunan Gedung	821.184.416	
VIII	Penyelenggaraan Jalan	203.264.222.198	
IX	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.651.483.221	
Jumlah		339.517.154.980	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No.1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - e-mail: bmcktr@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERASUKMA MUNAF, ST.MM
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

Padang, Januari 2023
PIHAK PERTAMA,


ERASUKMA MUNAF, ST.MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Gambar 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2023 (1)

PERJANJIAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (Skor 73,54)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73,70%
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77%
4	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum	84%
5	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84%
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	55,55%
		Presentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	40%
7	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	87%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.882.890.833,-	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.796.302.225,-	
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	622.312.600,-	
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	411.915.480,-	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	518.145.500,-	
6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	81.548.698.507,-	
7	Penataan Bangunan Gedung	821.184.416,-	
8	Penyelenggaraan Jalan	203.264.222.198,-	
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.651.483.221,-	
	<i>Jumlah</i>	339.517.154.980,-	

Padang, Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI


ERASUKMA MUNAF, ST.MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Gambar 2.2 Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas BMCKTR tahun 2023 (2)

Sasaran Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami revisi cascading terkait sasaran dan tujuan Kepala Dinas (Eselon II), disebabkan adanya perubahan nomenklatur Dinas Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang tersebut sudah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73.70 %
3	Meningkatnya kemantapan jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses Air Minum Layak	84%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses Sanitasi Layak	84%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	(1) Persentase bangunan strategis terbangun (2) Persentase Penataan bangunan pada Kawasan Strategis	6% 40%
7	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	87%

ANGGARAN PERUBAHAN

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi	51.028.119.878,00	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	979.393.380,00	APBD
3	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	584.232.907,00	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.185.990,00	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	530.305.500,00	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	79.752.862.195,00	APBD
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	879.443.253,00	APBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	199.525.277.485,00	APBD/ APBN
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.408.250.750,00	APBD
	JUMLAH	355.188.071.338,00	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email: bmcktr@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERASUKMA MUNAF, ST.MM.MT**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

Padang, 23 November 2023
PIHAK PERTAMA,


ERASUKMA MUNAF, ST.MM.MT
NIP. 19720925 199803 1 003

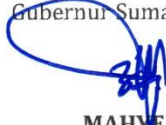
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2023 (1)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	73,70%
3	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77%
4	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84%
5	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84%
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6%
		Presentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	40%
7	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	87%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.028.119.878,-	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	979.393.380,-	
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	584.232.907,-	
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	500.185.990,-	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	530.305.500,-	
6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	879.443.253,-	
7	Penataan Bangunan Gedung	79.752.862.195,-	
8	Penyelenggaraan Jalan	199.525.277.485,-	
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.408.250.750,-	
	Jumlah	335.188.071.338,-	

PIHAK KEDUA,
 Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

Padang, 23 November 2023
PIHAK PERTAMA,


ERASUKMA MUNAF, ST.MM.MT
 NIP. 19720925 199803 1 003

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas BMCKTR tahun 2023 (2)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas BMCKTR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

2. Meningkatnya kemandapan jalan

Salah satu indikator dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas wilayah adalah meningkatnya kemandapan jalan. Kemandapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Dasar penetapan target pada tahun 2023 sebesar 77% mengacu pada target yang tertuang pada RPJMD. Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Rasio Kemandapan Jalan	=	$\frac{\text{Total Panjang Jalan Mantap Per Ruas (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\%$
	=	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\%$

3. Meningkatnya cakupan air minum layak

Meningkatkan penyediaan layanan air minum di Provinsi Sumatera Barat. Penetapan target Akses Air Minum sebesar 84% pada tahun 2023 didasarkan pada RPJMD mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Capaian Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari capaian dari capaian 19 Kabupaten/Kota. Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Akses Air Minum Layak	=	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses penyediaan air minum aman pada 19 kab/kota}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\%$
-----------------------	---	---

4. Meningkatnya cakupan sanitasi layak

Meningkatkan penyediaan layanan sanitasi di Provinsi Sumatera Barat. Penetapan target Akses Sanitasi Layak sebesar 84% pada tahun 2023 berdasarkan target di RPJMD dan mengacu pada target SDG's yang tertuang dalam RPJMN. Capaian Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari capaian dari capaian 19 Kabupaten/Kota, Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis sebagai berikut:

Akses Air Minum Layak	=	$\frac{\text{jumlah rumah yang akses sanitasi pada 19 Kab/Kota sampai tahun 2023}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\%$
-----------------------	---	---

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis diupayakan menetapkan kebijakan yang harus ditaati untuk menentukan pembangunan gedung serta pada tahap penataan bangunan dan lingkungan diharapkan perencanaan pembangunan gedung sesuai dengan kawasan strategis yang telah arahkan sehingga pembangunan gedung dapat dilaksanakan secara optimal. Dasar pengambilan target 2023 adalah mengacu pada RPJMD dan juga mempertimbangkan realisasi tahun 2022, perbaikan cara perhitungan target di RPJMD dan ketersediaan anggaran . Total bangunan yang harus dibangun oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 – 2026 adalah 18 bangunan yang terdiri dari: 1) Gedung Budaya, 2) Perkimtan, 3) Limbah B3, 4) Gedung MUI, 5) Inspektorat, 6) Gedung PPIPTEK, 7) Shelter Sasak, 8) Shelter SLBN 2 Padang, 9) Shelter Sikabalu, 10) Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis, 11) Shelter MTs Darul Hikmah, 12) Shelter Maligi, 13) Shelter Tanjung Mutiara, 14) TTIC Pasaman Barat, 15) Main Stadium, 16) Amphitheater Puncak Paku, 17) Amphitheater Pagaruyung, 18) Shelter Linggar Jati. Jumlah bangunan yang telah dibangun sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1 (satu) bangunan Shelter Linggar Jati. Sehingga Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat dihitung secara matematis dengan cara sebagai berikut:

Persentase Bangunan Strategis Terbangun	=	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Strategis yang Sudah dibangun}}{\text{Jumlah Total Bangunan Strategis}} \times 100\%$
---	---	---

6. Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007. Indikator dalam Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan adalah terkait capaian persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi Sumatera Barat. Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dapat ditentukan dengan membandingkan aspek muatan RPJMD tahun berjalan dengan muatan program RTRW, seperti Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah; Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah; dan Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya). Perhitungan nilai persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dengan cara membandingkan Jumlah Program RTRW dan Jumlah Program RPJMD Yang Sesuai Dengan RTRW, yang mana dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

% Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	=	$\frac{\text{Jumlah implementasi programRPJMD yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah indikasi program RTRW}} \times 100\%$
--	---	--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2023. Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja, secara matematis ditulis sebagai berikut :

a.
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (\text{realisasi yang } \mathbf{besar} \text{ menunjukkan } \mathbf{kinerja baik})$$

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

b.
$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (\text{realisasi yang } \mathbf{besar} \text{ menunjukkan } \mathbf{kinerja tidak baik})$$

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin buruk/tidak baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) pada tahun 2023, ada 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja atas 7 Sasaran dan 7 Indikator Kinerja Dinas BMCKTR Sumatera Barat menunjukkan Rata – Rata Capaian Realisasi Kinerja Sebesar 99,44% dengan Capaian terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi sebesar 120.08%.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 73.70	B 61.59%	83.57%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	73.70%	88.50%	120.08%
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77 %	67.99%	88.30%
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84 %	85.58%	101.88%
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi layak	84 %	84.95%	101.13%
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis Terbangun	6%	6 %	100%
7.	Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan Dengan Program RTRW Provinsi	87.00 %	88.00 %	101.15%
Rata - Rata Capaian					99.44%

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

C. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada analisis berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Salah satu tujuan dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tata kelola Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat yang baik, bersih dan profesional. Profesional diartikan menunjukkan mutu dan kualitas, yaitu seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya (*Skill, Knowledge dan Attitude*). *Skill* berarti seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge* berarti tak hanya ahli di bidangnya, tapi juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir *Attitude*, yang mana bukan hanya pintar dan cerdas, tapi juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sasaran yang perlu dipenuhi yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan Indikator Kinerja yang perlu dicapai ialah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Adapun lingkup akuntabilitas kinerja pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi. Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja nantinya berdasarkan hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2023, untuk realiasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memperoleh

nilai B dengan besaran nilai 61,59 (Baik) dan capaian sebesar 83,57% maka klasifikasi penilaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja dapat diindikasikan sebagai **Tinggi**.

Tabel 3.3 Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 73,70%	B 61,59%	83,57%

Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Dalam hal ini Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami penurunan pada beberapa komponen penilaian terhadap Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,33 % pada tahun sebelumnya dengan nilai 25 %, bobot pada komponen penilaian tersebut yakni 30 %. Komponen penilaian terhadap Pengukuran Kinerja dengan nilai 15,77 % pada tahun sebelumnya dengan nilai 19,79 % bobot pada komponen penilaian tersebut yakni 30 %. Komponen penilaian terhadap Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,34 % pada tahun sebelumnya dengan nilai 12,49 % dan bobot pada komponen penilaian tersebut yakni 15 %. Komponen Penilaian terhadap Evaluasi Internal dengan nilai 12,16 % pada tahun sebelumnya dengan nilai 6,19 % bobot pada komponen penilaian tersebut yakni 25 %, untuk ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Komponen Yang Dipilih	Nilai Tahun 2022		Nilai Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	25%	30%	23.33%
2	Pengukuran Kinerja	25%	19.79%	30%	25.77%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.49%	15%	10.34%
4	Evaluasi Internal	10%	6.19%	25%	12.16%
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	25%	-	-
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100%		100%	
Nilai Hasil Evaluasi Sakip			73.53		61.59

Sumber Data : Hasil Evaluasi Sakip Dinas BMCKTR Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi tersebut Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari realisasi pada tahun – tahun

sebelumnya dari nilai BB menjadi B dikarenakan adanya perubahan sistim penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021,2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,53 BB	73.60 BB	73.70 BB	73,53 BB	73.60 BB	61.59 B	100	100	83.57

Sumber data : LAKIP

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun sebelumnya, yaitu 2021 dan 2022, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk nilai capaian pada tahun 2023 seperti yang dijelaskan sebelumnya Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga menyebabkannya Penurunan Capaian di tahun 2023 sebanyak 16,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perubahan sistim penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan target akhir yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2023	REALISASI s/d 2023	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73.70 BB	61.59 B	74 BB

Berdasarkan data di atas, terdapat kesenjangan sebesar 12,41% antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Realisasi baru mencapai 61,59% di tahun 2023, diharapkan dengan upaya yang maksimal, target Renstra dapat dicapai pada tahun 2026.

Untuk dapat memenuhi pencapaian target Nilai LKjIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera pada tahun 2023, maka telah dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Adanya perbaikan sistem SAKIP yang ditetapkan oleh Gubernur untuk meningkatkan nilai kinerja provinsi dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
- Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
- Adanya perbaikan terhadap sistem SAKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Adanya perbaikan pada dokumen kinerja (LKJ) dan kelengkapan data dukungannya.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Namun dalam merealisasikan target kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target yaitu sebagai berikut:

- Tidak samanya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk menyamakan persepsi di internal Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
- Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Kedepannya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melakukan upaya menjaga dan meningkatkan kinerja diantaranya

adalah dengan melakukan Rapat dan Koordinasi Internal untuk persamaan persepsi tentang pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program pada Sekretariat yang mendukung dalam pencapaian target kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 360.778.839,00 dan terealisasi sebesar Rp. 344.139.593,00 dengan persentase realisasi anggaran mencapai 95,39%. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	360.778.839,00	344.139.593,00	95,39
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.778.839,00	344.139.593,00	95,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.047.125,00	150,108,233,00	96,81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.731.714,00	194.031.360,00	94,31

Untuk menghitung Tingkat efisiensi pengguna sumber daya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(360.778.839,00 \times 83,57\%) - 344.139.593,00}{(360.778.839,00 \times 83,57\%)} \times 100$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -14,14$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan Tingkat Efisiensi diatas dapat di sampaikan bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi yang ditetapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 belum efisien dalam penggunaan Anggaran ini disebabkan karena Tingkat capaian kinerja yang masih rendah meskipun capaian realisasi anggaran mencapai 95,39%.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi yang merupakan cerminan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melayani dengan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. Sumber data indikator kinerja sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil survei kepuasan dengan menggunakan form kuesioner terhadap kinerja pelayanan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Kuesioner ini diisi oleh rekanan, penyedia dan konsultan (Bidang/UPTD) serta pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat) terkait dengan layanan sesuai dengan tupoksinya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan data pada kuesinor yang telah diisi, kepuasan terhadap pelayanan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 dengan target 73,70% dapat terealisasi sebesar 88,50% dengan tingkat capaian kinerja yang dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	73,70%	88,50%	120,08%

Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja

Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan rincian sebagaimana yang ada pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan Skala 1 sampai 4, dimana pilihan A bernilai 4, B bernilai 3, C bernilai 2, dan D bernilai 1, untuk masing-masing pertanyaan yang disebar dalam bentuk kuesioner. Dari 11 pertanyaan (untuk responden 1 orang), nilai maksimal yang mungkin didapat ialah 44. Sebagai contoh dimisalkan perhitungan untuk masing-masing skala penilaian ialah sebagai berikut:

- 4 Pertanyaan dinilai "A", maka $4 \times 4 = 16$
- 3 Pertanyaan dinilai "B", maka $3 \times 3 = 9$
- 3 Pertanyaan dinilai "C", maka $3 \times 2 = 6$
- 1 Pertanyaan dinilai "D", maka $1 \times 1 = 1$

Semua hasil penilaian tersebut kemudian ditotal untuk mendapatkan nilai untuk 1 responden yaitu 32. Untuk mendapatkan indeks penilaian pelayanan publik (1 responden) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi} &= \frac{\text{Total nilai untuk 1 responden}}{\text{Total nilai maksimal}} \times 100\% \\ &= \frac{32}{44} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi} &= 72,73 \% \text{ (Mutu Layanan C (Kurang Baik))} \end{aligned}$$

Mengacu pada metode penilaian di atas, maka setelah kuesioner diisi oleh rekanan, penyedia dan konsultan (Bidang/UPTD) serta pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat), data rekapitulasi hasil kuesioner pelayanan publik untuk penentuan realisasi kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dapat dianalisis dengan cara mengambil nilai

rata-rata dari semua nilai responden yang telah mengisi kuesioner. Dari hasil perhitungan, kemudian didapatkan nilai indikator kinerja untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ialah sebesar 88,50%. Dengan indikasi nilai berada pada rentang 88,31-100,00, maka nilai mutu dan kinerja unit pelayanan (berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikategorikan sebagai **A (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang telah melakukan kerja sama dengan Bidang/UPTD Dinas serta internal Dinas sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Dengan pencapaian target sebesar 120,08%, maka klasifikasi penilaian untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dapat diindikasikan sebagai **Sangat Tinggi**.

Untuk Perbandingan realisasi kinerja & capaian dengan tahun lalu dilakukan untuk menunjukkan capaian yang telah diraih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan capaian. Realisasi kinerja dan capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2021, 2022 & 2023 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja & Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	-	73,60	73,70	-	90,32	88,50	-	122,71	120,08

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi baru ada pada tahun 2022. Dengan perbandingan capaian realisasi pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan sebesar 2,63% di tahun 2023. Meskipun demikian realisasi pada tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada Tingkat Kepuasam Terhadap Pelayanan Organisasi tercapai. Sedangkan untuk perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2023	REALISASI s/d 2023	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	73.70	88,50	74

Berdasarkan data di atas Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target yang ditetapkan dalam Renstra dapat disimpulkan bahwa target Renstra telah dapat dicapai pada tahun 2023.

Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan kegiatan pengukuran tentang tingkat kepuasan rekanan, penyedia dan konsultan serta pegawai dinas terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Bidang/UPTD maupun Sekretariat sebagai penyelenggara pelayanan publik di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dinas dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang mendukung tercapainya target kinerja untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ialah sebagai berikut:

- Telah terlalankannya tupoksi pada masing-masing Bidang/UPTD maupun Sekretariat dengan baik dan efisien, sehingga program/kegiatan yang dilakukan bersama rekanan, penyedia serta kebutuhan pegawai dapat diayomi dengan baik.
- Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola dan membekali aparat menjadi sumber daya insan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan pelayanan yang prima.
- Kemudahan dalam menyebarkan kuesioner dan mendapatkan respon yang cepat dari rekanan, penyedia dan juga pegawai, membantu aparat terkait dalam menganalisis data dengan cepat dan tepat.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sesuai dengan apa yang direncanakan, dinas BMCKTR telah melaksanakan pengisian Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan rekanan, penyedia dan konsultan serta pegawai dinas terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Bidang/UPTD maupun Sekretariat sebagai penyelenggara pelayanan publik di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

3. Meningkatnya Kemantapan Jalan

Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620 – 357 - 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi perubahan atas Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya, diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah 1690.50 Km mengalami peningkatan sepanjang 165.30 Km dari tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Rasio Kemantapan Jalan provinsi pada Tahun 2023 sebesar 67.99% dimana secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemantapan Jalan} &= \frac{\text{Total Panjang Jalan Mantap Per Ruas (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\% \\
 &= \frac{(1040.76 + 108.59) \text{ Km}}{1690.50 \text{ Km}} \times 100\% \\
 \text{Rasio Kemantapan Jalan} &= 67.99 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	77%	67,99%	88,29%

Dengan pencapaian target sebesar 88,29%, maka klasifikasi penilaian untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi adalah **Tinggi**.

Tabel 3.13 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2023

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Patok KM		Lebar Perkerasan (m)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
NOMOR	Nama		Dari	Ke		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
007	Simancung - Tanjung Ampalu	10.62	0+000	10+620	4.50	6.92	3.30	0.40	0.00	10.22	0.40	96.23	3.77
008	Tanjung Ampalu - Sinjunjung	20.00	0+000	20+000	8.07	16.80	2.10	1.10	0.00	18.90	1.10	94.50	5.50
010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29.00	0+000	29+000	4.19	21.70	3.60	3.50	0.20	25.30	3.70	87.24	12.76
011	Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11.90	0+000	11+900	4.00	9.40	1.00	1.50	0.00	10.40	1.50	87.39	12.61
012	Simp. Koto Baru - Junction	5.40	0+000	5+400	4.50	5.00	0.20	0.20	0.00	5.20	0.20	96.30	3.70
018	Inderapura - Muara Sakai	7.30	0+000	7+300	3.70	7.00	0.30	0.00	0.00	7.30	0.00	100.00	0.00
025	Manggopoh - Padang Luar	69.43	0+000	69+430	5.82	41.03	9.00	19.40	0.00	50.03	19.40	72.06	27.94
028	Sicincin - Kurai Taji	16.44	0+000	16+440	5.00	9.64	3.00	3.80	0.00	12.64	3.80	76.89	23.11
031	Panti - Simpang Empat	74.23	0+000	74+230	4.50	45.43	13.50	15.00	0.30	58.93	15.30	79.39	20.61
033.1	Simpang Empat - Sasak	20.00	0+000	20+000	4.50	17.80	1.50	0.70	0.00	19.30	0.70	96.50	3.50
033.2	Sasak - Maligi	21.20	0+000	21+200	3.93	1.63	1.30	0.50	17.77	2.92	18.27	13.80	86.20
034	Air Balam - Air Bangis	12.60	0+000	12+600	5.00	12.30	0.10	0.20	0.00	12.40	0.20	98.41	1.59
035	Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18.50	0+000	18+500	5.50	10.20	2.80	5.50	0.00	13.00	5.50	70.27	29.73
036	Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28.50	0+000	28+500	5.56	11.50	2.90	13.30	0.80	14.40	14.10	50.53	49.47
037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10.40	0+000	10+400	6.00	8.60	0.30	1.50	0.00	8.90	1.50	85.58	14.42
038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	29.60	0+000	29+600	4.78	22.36	1.60	5.64	0.00	23.96	5.64	80.96	19.04
039	Guguk Cino - Sitangkai	14.70	0+000	14+700	4.50	9.90	1.20	3.40	0.20	11.10	3.60	75.51	24.49
040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17.50	0+000	17+500	6.00	11.90	2.50	3.10	0.00	14.40	3.10	82.29	17.71
044	Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	44.00	0+000	44+000	5.85	25.68	4.00	11.50	2.82	29.68	14.32	67.45	32.55
054	Junction - Abai Siat (Bts. Jambi)	12.60	0+000	12+600	4.00	12.50	0.00	0.10	0.00	12.50	0.10	99.21	0.79
055	Sijunjung - Tanah Badantung	4.40	0+000	4+400	7.00	3.60	0.30	0.50	0.00	3.90	0.50	88.64	11.36
056.1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20.00	0+000	20+000	6.48	18.00	0.30	1.70	0.00	18.30	1.70	91.50	8.50

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Patok KM		Lebar Perkerasan (m)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
NOMOR	Nama		Dari	Ke		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17.00	0+000	17+000	4.00	12.50	1.70	2.70	0.10	14.20	2.80	83.53	16.47
056.3	Abai Sangir - Sei. Dareh	73.65	0+000	73+650	4.00	22.01	2.30	1.10	48.24	24.31	49.34	33.01	66.99
068	Padang Sawah - Kumpulan	36.50	0+000	36+500	4.00	33.80	1.10	1.60	0.00	34.90	1.60	95.62	4.38
069.1	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	42.75	0+000	42+750	4.64	35.60	4.20	2.80	0.15	39.80	2.95	93.10	6.90
069.2	Sp. Pua Data - Sp. Sei Dadok - Museum PDRI	5.17	0+000	5+170	3.68	3.07	0.50	0.10	1.50	3.57	1.60	69.05	30.95
070	Batu Sangkar - Ombilin	17.00	0+000	17+000	7.00	10.30	3.20	3.50	0.00	13.50	3.50	79.41	20.59
071	Solok - Alahan Panjang	46.80	0+000	46+800	4.51	42.30	2.80	1.20	0.50	45.10	1.70	96.37	3.63
072	Lubuk Basung - Sungai Limau	28.60	0+000	28+600	4.50	24.40	2.80	1.30	0.10	27.20	1.40	95.10	4.90
073	Pasar Baru - Alahan Panjang	44.95	0+000	44+950	4.51	38.25	0.10	0.00	6.60	38.35	6.60	85.32	14.68
075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	22.50	0+000	22+500	4.77	22.30	0.20	0.00	0.00	22.50	0.00	100.00	0.00
076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73.95	0+000	73+950	4.39	51.53	3.30	2.50	16.62	54.83	19.12	74.14	25.86
078	Simp. Koto Mambang - Balingka	39.40	0+000	39+400	6.99	39.00	0.15	0.25	0.00	39.15	0.25	99.37	0.63
079	Simp. Baso - Piladang	10.50	0+000	10+500	4.71	7.20	0.50	2.40	0.40	7.70	2.80	73.33	26.67
080	Matur - Palembang	20.70	0+000	20+700	4.00	18.40	0.90	1.40	0.00	19.30	1.40	93.24	6.76
081	Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13.30	0+000	13+300	4.00	11.73	0.10	0.90	0.57	11.83	1.47	88.95	11.05
082.1	Alahan Panjang - Kiliran Jao	94.00	0+000	94+000	5.61	13.40	3.80	1.60	75.20	17.20	76.80	18.30	81.70
082.2	Simp. Sikundua - Garabak	3.06	0+000	3+060	4.50	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	100.00
083.1	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44.10	0+000	44+100	5.75	43.80	0.10	0.20	0.00	43.90	0.20	99.55	0.45
083.2	Gerbang Teluk Kabung - Mandeh	0.52	0+000	0+520	6.00	0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	50.00	50.00
083.3	Pelabuhan TPI Carocok - Tarusan	1.10	0+000	1+100	4.50	0.40	0.10	0.60	0.00	0.50	0.60	45.45	54.55
084	Jalan Lingkar Selatan - Bts. Payakumbuh	7.98	0+000	7+980	8.23	2.98	3.80	1.20	0.00	6.78	1.20	84.96	15.04
085	Balai Panjang - Sp. Pdg Karambia - Tj. Bungo (TPA)	5.00	0+000	5+000	5.98	3.50	1.20	0.30	0.00	4.70	0.30	94.00	6.00
086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	29.30	0+000	29+300	3.50	16.48	0.80	0.37	11.65	17.28	12.02	58.98	41.02
087	Duku - Sicincin	20.58	0+000	20+580	6.35	10.30	0.10	0.04	10.14	10.40	10.18	50.53	49.47

Ruas Jalan		Panjang Survei (km)	Patok KM		Lebar Perkerasan (m)	Kondisi				Kemantapan		Kemantapan	
NOMOR	Nama		Dari	Ke		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
088	Padang Koto Gadang - Palembang	31.00	0+000	31+000	4.35	24.40	0.60	5.70	0.30	25.00	6.00	80.65	19.35
090	Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	25.00	0+000	25+000	3.81	12.05	1.40	3.70	7.85	13.45	11.55	53.80	46.20
091	Smp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	14.65	0+000	14+650	6.09	6.83	1.33	0.70	5.79	8.16	6.49	55.70	44.30
092	Simp. Ganting - Bts Tanah Datar - Sumani	32.80	0+000	32+800	4.50	32.60	0.00	0.20	0.00	32.60	0.20	99.39	0.61
093	Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting	38.75	0+000	38+750	4.41	30.37	3.20	1.70	3.48	33.57	5.18	86.63	13.37
094	Pintu Angin - Labuah Saiyo	5.61	0+000	5+610	8.00	5.21	0.20	0.20	0.00	5.41	0.20	96.43	3.57
095	Rao - Rokan (Batas Riau)	33.00	0+000	33+000	4.50	31.10	1.00	0.90	0.00	32.10	0.90	97.27	2.73
096	Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang)	33.00	0+000	33+000	5.30	21.07	0.90	0.20	10.83	21.97	11.03	66.58	33.42
097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43.20	0+000	43+200	6.00	26.90	0.20	0.10	16.00	27.10	16.10	62.73	37.27
098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12.00	0+000	12+000	9.28	11.80	0.10	0.10	0.00	11.90	0.10	99.17	0.83
099	Purus - Bandara International Minangkabau	16.00	0+000	16+000	1.20	0.40	0.00	0.00	15.60	0.40	15.60	2.50	97.50
100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1.00	0+000	1+000	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00
101	Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47.00	0+000	47+000	3.94	21.86	0.70	0.20	24.24	22.56	24.44	48.00	52.00
102	Rawang - Talawi	12.90	0+000	12+900	4.00	4.88	3.71	0.30	4.01	8.59	4.31	66.59	33.41
103	Simp Sp II - Kantor Camat	5.10	0+000	5+100	5.17	3.63	0.20	0.30	0.97	3.83	1.27	75.10	24.90
104	Kantor Camat - Berkat	5.90	0+000	5+900	4.44	4.80	0.40	0.70	0.00	5.20	0.70	88.14	11.86
105	Bonjol - Suliki	20.80	0+000	20+800	3.93	1.10	0.60	0.90	18.20	1.70	19.10	8.17	91.83
106	Unggan - Pamusian - Tapi Selo	26.06	0+000	26+060	3.33	8.36	5.50	1.00	11.20	13.86	12.20	53.18	46.82
107	Tiku - Sasak	90.00	0+000	90+000	1.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	100.00
TOTAL		1,690.50				1,040.76	108.59	135.50	405.65	1,149.35	541.15	67.99	32.01

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja dan capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2021, 2022 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Rasio Kemantapan Jalan tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2020	2021	2022
1.	Rasio Kemantapan Jalan	73	75	77	73,015	71,40	67,99	100,08	100,02	88,29

Sumber data : LAKIP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2022 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Namun untuk tahun 2022 dan 2023, target yang telah ditetapkan tidak berhasil dicapai dengan realisasi yang dapat terlaksana ialah sebesar 71,40% dari target 75% pada tahun 2022 dan 67,99% dari target 77% pada tahun 2023. Belum tercapainya target Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 salah satunya disebabkan karena terjadinya bencana alam pada tahun 2022 (gempa bumi di Pasaman, banjir bandang, longsor dan terban) di ruas-ruas jalan provinsi. Hal ini mengakibatkan penurunan kondisi ruas jalan yang semula berada pada kondisi mantap menjadi tidak mantap dan bertambahnya Panjang ruas jalan penanganan Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan kemantapan Jalan Nasional berdasarkan data dari Buku Kondisi Jalan Nasional 2023 Semester 1 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, diketahui bahwa Persentase Kondisi Jalan Mantap untuk Jalan Nasional pada semester I tahun 2023 adalah 92,24% sementara Kemantapan Jalan Provinsi berada pada posisi 67,99%. Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dan Provinsi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Kemantapan Jalan Dengan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2022)		DEVIASI (%)
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Rasio Kemantapan Jalan	67,99	92,24	-24,25

Dari tabel di atas, dapat diindikasikan bahwa nilai Kemantapan Jalan Nasional lebih tinggi dibanding jalan Provinsi, yaitu dengan selisih 24,25%.

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2023 ialah sebesar 77%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kemantapan Jalan s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2023	TARGET s/d 2023	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	67.99%	77%	82%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi ialah sebesar baru mencapai sebesar 82.91% dari target Akhir Periode Renstra. Diharapkan dengan upaya yang maksimal, target Renstra dapat dicapai pada tahun 2026.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan antara lain:

- Panjang jalan yang dibangun sepanjang 7,23 Km pada 4 Ruas Jalan.
- Pembangunan 1 unit jembatan sepanjang 90 Meter.
- Menambah lajur Jalan sepanjang 0,83 Km di 1 Ruas jalan.
- Pelebaran Jalan Menuju standar 22,30 Km dalam 5 ruas jalan.
- Melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 71,81 Km dalam 6 ruas
- Melakukan rehabilitasi jalan sepanjang 247,85 Km
- Melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 1.667 Km Jalan pada 49 Ruas Jalan provinsi
- Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dan Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan dan penanganan jalan.
- Mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD dalam penyelenggaraan jalan (DAK, dana Inpres, dana APBN).

Indikator Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Provinsi yang tercapai sebesar 67.99% pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77%, sehingga capaian kinerja yang dapat diraih hanya sebesar 88.29%. Belum tercapainya

target Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, pertama karena terjadinya bencana alam pada tahun 2022 dan mengakibatkan penurunan kondisi ruas jalan yang semula berada pada kondisi mantap menjadi tidak mantap. Faktor lainnya adalah, Pada Tahun 2023 ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620 – 357 - 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi sehingga Jalan penanganan Provinsi yang pada awalnya hanya sepanjang, 1525,20 Km menjadi 1690,50 Km di Tahun 2023. Selanjutnya karena belum tersedianya rencana pembangunan jalan dan utilitas secara terintegrasi serta karena adanya beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi melewati daerah tambang sehingga kendaraan bermuatan lebih merusak badan jalan.

Upaya kedepannya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator kinerja adalah dengan memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan utilitas jalan dan memaksimalkan perencanaan pada daerah – daerah rawan bencana.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan pada Tahun 2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	199,525,277,485	197,045,831,669	98.76
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	199,525,277,485	197,045,831,669	98.76
Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5,738,381,087	5,715,594,528	99.60
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	3,550,417,894	3,468,354,626	97.69

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
Pengelolaan Leger Jalan	974,715,000	954,464,632	97.92
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	549,461,500	546,002,148	99.37
Pembangunan Jalan	42,852,938,982	42,568,800,059	99.34
Pelebaran Jalan Menuju Standar	22,309,892,625	22,064,715,541	98.90
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	4,446,847,112	4,364,332,653	98.14
Rekonstruksi Jalan	30,788,432,352	30,471,412,303	98.97
Rehabilitasi Jalan	28,118,438,180	27,655,564,480	98.35
Pembangunan Jembatan	7,838,140,393	7,143,258,550	91.13
Penggantian Jembatan	10,697,859,223	10,654,859,549	99.60
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	78,627,250	78,113,889	99.35
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	594,366,640	589,814,808	99.23
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	82,662,400	82,216,219	99.46
Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	400,000,000	397,734,994	99.43
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	7,021,056,424	7,000,051,796	99.70
Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	320,600,000	320,382,200	99.93
Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	904,130,939	902,223,500	99.79
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	5,956,771,113	5,850,140,884	98.21
Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	247,291,972	246,514,610	99.69
Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	968,104,209	968,092,077	100.00
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	4,507,605,815	4,496,425,180	99.75
Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	61,397,000	61,381,400	99.97

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	5,834,118,960	5,825,052,784	99.84
Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	286,581,041	286,176,637	99.86
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	4,883,885,827	4,883,227,478	99.99
Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	83,599,697	82,626,000	98.84
Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	501,000,000	483,022,000	96.41
Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	5,696,000,000	5,689,229,617	99.88
Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	164,500,000	164,338,900	99.90
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat UPTD Workshop dan Peralatan	1,191,847,900	1,169,249,217	98.10
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan UPTD Workshop dan Peralatan	673,254,950	662,277,693	98.37
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan UPTD Laboratorium dan Bahan	1,202,351,000	1,200,180,717	99.82

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 199.525.277.485,00 dengan realiasi anggaran yang dapat diserap ialah sebesar Rp 197.045.831.669,00. Namun dari capaian realisasi anggaran yang mencapai 98,76 % tersebut, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat masih mengalami kendala dimana untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan sebesar 2% dibutuhkan pembangunan/rekonstruksi jalan sepanjang 30 Km, sedangkan kondisi anggaran yang tersedia pada tahun 2023 hanya mampu untuk melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 7,23 Km. Untuk menghitung Tingkat efesiensi penggunaa sumber daya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efesiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efesiensi} = \frac{(199.525.277.485 \times 88.29\%) - 197.045.831.669}{((199.525.277.485 \times 88.29\%))} \times 100$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -11.86$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan Tingkat Efisiensi diatas dapat di sampaikan bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan yang ditetapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 belum efisien dalam penggunaan Anggaran, ini disebabkan karena Tingkat capaian kinerja yang hanya 88,29% meskipun capaian realisasi anggaran mencapai 98,76%.

4. Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak

Sasaran selanjutnya yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak dengan indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Akses Air Minum Layak. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Dapat dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia. Air yang layak minum adalah air yang berwarna jernih, tidak berbau, rasanya tawar, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selain itu, air yang aman untuk diminum juga harus bebas dari sumber pencemaran, seperti binatang yang membawa penyakit, logam atau bahan kimia lainnya

Penyediaan air minum layak merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya. Baik dengan pengelolaan berbasis bisnis, distribusi, maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk menyediakan Air minum khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga ketersediaan kualitas air minum yang cukup dengan mendorong penyediaan infrastruktur dasar pemukiman di daerah perkotaan.

Cakupan air minum layak merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access Nasional*. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, untuk data pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak

diperoleh oleh Bidang Cipta Karya melalui “Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2023” yang bersumber dari data PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas.

Untuk Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat pada tahun 2023, Analisanya dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Akses Air Minum Layak} &= \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses penyediaan air minum aman pada 19 kab/kota}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.128.353}{1.318.448} \times 100\% \\
 \text{Akses Air Minum Layak} &= 85,58 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai di tahun 2023 untuk Akses Air Minum Layak ialah sebesar 85,58%.

Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2023 untuk Akses Air Minum Layak, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi tahun berjalan (84% untuk tahun 2023). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{85,58\%}{84\%} \times 100\% \\
 \% \text{ Capaian Kinerja} &= 101,88 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Akses Air Minum Layak Layak di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84%	85,58%	101,88 %

Dengan pencapaian target sebesar 101,88 %, maka klasifikasi penilaian untuk Akses Air Minum Layak dapat diindikasikan sebagai **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.19 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES	AKSES			Persen (%)			
				Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah	Tidak Akses	Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah
				(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	Rumah	Rumah	Rumah	Rumah
1	Agam	116,766	15,228	101,538	0	101,538	13.04	86.96	0.00	86.96
2	Dharmasraya	58,526	6,395	17,013	35,118	52,131	10.93	29.07	60.00	89.07
3	Kepulauan Mentawai	13,934	5,294	3,602	4,458	8,060	37.99	25.85	31.99	57.84
4	Lima Puluh Kota	98,056	17,876	39,012	41,168	80,180	18.23	39.79	41.98	81.77
5	Padang Pariaman	92,129	25,750	45,764	20,615	66,379	27.95	49.67	22.38	72.05
6	Pasaman	75,767	13,175	52,822	9,770	62,592	17.39	69.72	12.89	82.61
7	Pasaman Barat	99,329	16,822	21,953	60,554	82,507	16.94	22.10	60.96	83.06
8	Pesisir Selatan	107,610	10,696	49,906	45,708	95,614	9.94	46.38	42.48	88.85
9	Sijunjung	56,304	17,813	36,281	2,210	38,491	31.64	64.44	3.93	68.36
10	Kabupaten Solok	118,899	20,060	35,046	63,793	98,839	16.87	29.48	53.65	83.13
11	Solok Selatan	38,140	9,460	12,139	15,991	28,130	24.80	31.83	41.93	73.75
12	Tanah Datar	79,187	15,830	20,599	41,970	62,569	19.99	26.01	53.00	79.01
13	Bukittinggi	27,744	3,150	7,722	16,872	24,594	11.35	27.83	60.81	88.65

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES	AKSES			Persen (%)			
				Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah	Tidak Akses	Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah
				(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	Rumah	Rumah	Rumah	Rumah
14	Padang	238,362	5,792	176,277	56,293	232,570	2.43	73.95	23.62	97.57
15	Padang Panjang	17,425	349	16,078	998	17,076	2.00	92.27	5.73	98.00
16	Pariaman	17,748	1,407	4,985	11,356	16,341	7.93	28.09	63.98	92.07
17	Payakumbuh	35,559	0	31,740	3,819	35,559	0.00	89.26	10.74	100.00
18	Sawahlunto	14,300	944	7,921	4,875	12,796	6.60	55.39	34.09	89.48
19	Kota Solok	12,663	276	10,956	1,431	12,387	2.18	86.52	11.30	97.82
Provinsi Sumatera Barat		1,318,448	186,317	691,354	436,999	1,128,353	14.13	52.44	33.14	85.58

Sumber Data OPD Pengampu SPM Air Minum 19 Kabupaten/Kota per Februari 2024

Untuk Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Akses Air Minum Layak pada tahun 2021, 2022 & 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Akses Air Minum Layak tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Akses Air Minum Layak	81	82	84	82,26	83,78	85,58	101,56	102,17	101,88

Sumber data : LAKIP

Capaian pada peningkatan air minum layak pada Provinsi Sumatera setiap tahunnya berhasil mencapai lebih dari 100%. Adapun capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, baik kinerja dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan Capaian Akses Air Minum Layak Nasional berdasarkan data dari Susenas yang di olah oleh Bappenas diketahui bahwa Persentase Capaian Akses Air Minum Layak pada Tingkat nasional sebesar 91,72 % sedangkan capaian secara provinsi baru mencapai 85,58% dengan selisih 6,14% terhadap capaian Nasional.

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Persentase Akses Air Minum Dengan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2022)		DEVIASI (%)
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Akses Air Minum Layak	85,58	91,72	-6,14

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 ialah sebesar 84%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2023	TARGET s/d 2023	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	85,58%	84%	90%

Dari tabel diketahui bahwa capaian air minum s/d Tahun 2023 telah tercapai dari 85,58% pada tahun 2023 dan 95,08% terhadap renstra.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari PDAM dan Pamsimas, ditemukan bahwa Akses Air Minum Layak Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 sebesar 85,58%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target Tahun 2023 yaitu 84%. Hal ini dikarenakan kegiatan pendukung yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi pengerjaan rata-rata mencapai target 100%. Adapun beberapa faktor pendukung lainnya yang membantu dalam pencapaian target kinerja Akses Air Minum Layak ialah sebagai berikut:

- Kepedulian Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan capaian SPM
- Mendorong Kabupaten/Kota untuk menyusun program dan perencanaan (Readiness Criteria) melalui pembinaan dan monev
- Merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penganggaran terhadap akses air minum skala kecil (Pamsimas)
- Berkoordinasi dengan balai BPPW untuk peningkatan Akses air minum ke Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Akses Air Minum Layak tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain:

- Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembina terkait air minum dan sanitasi layak sulit untuk diimplementasikan
- Kewenangan provinsi terbatas hanya ada pada kegiatan SPAM Regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah
- Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (long term construction)
- Konflik sosial yang sangat tinggi antar kab/kota

- Kemampuan fiskal provinsi dan kab/kota di Sumatera Barat sangat lemah
- Rendahnya kepedulian dan komitmen legislatif terhadap akses air minum layak dan sanitasi layak

Upaya yang dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan Cakupan Air Minum Layak dimasa yang akan datang antara lain:

- Memilih kab/kota yang memiliki minat tinggi terhadap SPAM menjadi pilot project.
- Advokasi kepada kepala daerah Kabupaten/Kota tentang pentingnya pemenuhan layanan dasar (air minum dan sanitasi layak).
- Mengoptimalkan akses air minum yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Akses Air Minum layak yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Ketersediaan pagu anggaran awal program pendukung pencapaian indikator kinerja cakupan air minum
- Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Akses Air Minum Layak

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	979.393.380,00	484.456.042,00	49,87
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	979.393.380,00	484.456.042,00	49,87
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	885.001.600,00	421.663.137,00	47,65
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	94.391.780,00	66.792.905,00	70,76

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2023 Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 979.393.380,00, yang mana hanya dapat direalisasikan sebesar 49,87% untuk mendukung peningkatan cakupan air minum layak. Dalam hal ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Air Minum yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan air minum di daerah. Untuk menghitung Tingkat efesiensi penggunaa sumber daya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 sebagai berikut:

$$Tingkat\ Efesiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efesiensi = \frac{(979.393.380 \times 101.88\%) - 484.456.042}{(979.393.380 \times 101.88\%)} \times 100$$

$$Tingkat\ Efesiensi = 51.45\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan Tingkat Efisiensi diatas dapat di sampaikan bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak yang ditetapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah berhasil melakukan efisien sebesar 51,45% dalam penggunaan anggaran sebanyak Rp. 484.456.042,00 dari Rp. 979.393.380,00.-

5. Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak

Untuk sasaran selanjutnya yang perlu dipenuhi oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak dengan indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Akses Sanitasi Layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Ini berarti bahwa sanitasi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan. Maka dari itu peran pemerintah sangat besar terhadap sanitasi/akses sanitasi layak karena pemerintah harus mengubah perilaku yang sengaja atau kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti membuang sampah sembarangan serta pembuangan air limbah.

Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access Nasional*. Berdasarkan data yang ada pada Bidang Cipta Karya, diketahui bahwa untuk mencapai target pemenuhan rumah tangga bersanitasi dianalisis dari data akses jamban yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisa dari data Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2023, dapat dihitung Akses Sanitasi Layak pada Tahun 2023 secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Akses Air Minum Layak} &= \frac{\text{jumlah rumah yang akses sanitasi pada 19 Kab/Kota sampai tahun 2023}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.120.057}{1.318.448} \times 100\% \\ \text{Akses Air Minum Layak} &= 84,95\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2023 untuk Akses Sanitasi Layak ialah sebesar 84,95%. Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2023 untuk Akses Sanitasi Layak, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Provinsi tahun berjalan (84% untuk tahun 2023). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{84,95\%}{84\%} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= 101,13\% \end{aligned}$$

Tabel 3.24 Target dan Capaian Indikator Akses Sanitasi Layak di Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84%	84,95%	101,13%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat)

Dengan pencapaian target sebesar 101,13%, maka klasifikasi penilaian untuk Akses Sanitasi Layak dapat diindikasikan sebagai **Sangat Baik**.

Tabel 3.25 Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES		AKSES			JUMLAH		PERSENTASE		
			BABS	CUBLUK PERKOTAAN	DASAR (CUBLUK PERDESAAN)	SPALDS	SPALDS AMAN	SPALD-T AMAN	TIDAK AKSES	AKSES	TIDAK AKSES	AKSES
			(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(%)	(%)
1	Agam	116,766	24,209	20,955	69,273	0	2,328	24,209	92,556	20.73	79.27	116,766
2	Dharmasraya	58,526	4,412	1,228	51,991	2,600	895	4,412	56,714	7.54	96.90	58,526
3	Kepulauan Mentawai	13,934	4,720	1,007	8,607	0	0	4,720	9,614	33.87	69.00	13,934
4	Lima Puluh Kota	98,056	20,272	18,460	57,058	2,266	0	20,272	77,784	20.67	79.33	98,056
5	Padang Pariaman	92,129	22,420	43,160	25,838	6,247	2,064	22,420	77,309	24.34	83.91	92,129
6	Pasaman	75,767	33,198	29,511	29,368	0	120	33,198	58,999	43.82	77.87	75,767
7	Pasaman Barat	99,329	27,307	0	78,522	0	0	27,307	78,522	27.49	79.05	99,329
8	Pesisir Selatan	107,610	11,992	38,589	46,073	8,567	2,389	11,992	95,618	11.14	88.86	107,610
9	Sijunjung	56,304	7,489	22,440	26,375	0	0	7,489	48,815	13.30	86.70	56,304
10	Kabupaten Solok	118,899	18,088	10,575	34,957	54,589	690	18,088	100,811	15.21	84.79	118,899
11	Solok Selatan	38,140	8,417	19,539	9,703	0	481	8,417	29,723	22.07	77.93	38,140
12	Tanah Datar	79,187	16,993	33,496	28,698	0	0	16,993	62,194	21.46	78.54	79,187
13	Bukittinggi	27,744	1,367	4,058	21,196	1,123	0	1,367	26,377	4.93	95.07	27,744
14	Padang	238,362	52,868	5,255	174,264	30,386	2,086	52,868	211,991	22.18	88.94	238,362
15	Padang Panjang	17,425	0	2,408	12,842	0	2,175	0	17,425	0.00	100.00	17,425
16	Pariaman	17,748	5,245	1,968	11,238	213	1,884	5,245	15,303	29.55	86.22	17,748
17	Payakumbuh	35,559	309	529	27,125	7,596	0	309	35,250	0.87	99.13	35,559
18	Sawahlunto	14,300	1,503	602	11,722	473	0	1,503	12,797	10.51	89.49	14,300
19	Kota Solok	12,663	528	713	11,190	266	86	528	12,255	4.17	96.78	12,663
Provinsi Sumatera Barat		1,318,448	261,337	254,493	736,040	114,326	15,198	261,337	1,120,057	19.82	84.95	1,318,448

Untuk Realisasi kinerja dan capaian Akses Sanitasi Layak pada tahun 2021, 2022 & 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26 Realisasi Kinerja & Capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2021, 2022 & 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Akses Sanitasi Layak	80	82	84	82,05	83,08	84,95	102,56	101,32	101,13

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Akses Sanitasi Layak pada tahun 2023 ialah sebesar 84%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi Layak s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2023	TARGET s/d 2023	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84,95%	84 %	90%

Dari tabel diketahui bahwa capaian Akses Sanitasi Layak sampai dengan Tahun 2023 mencapai 84,95% dan 94,38% terhadap Renstra.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dapat dijelaskan bahwa Akses Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 ialah sebesar 84,95%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target Tahun 2023 yaitu 84%. Adapun beberapa faktor pendukung lainnya yang membantu dalam pencapaian target kinerja Akses Sanitasi Layak ialah sebagai berikut:

- Telah masuk dalam program dan kegiatan melalui pembinaan kegiatan SSK di pokja PKP Provinsi
- Memperkuat pembinaan melalui kegiatan Monev dan advokasi kepada stakeholder di Kabupaten/Kota
- Melaksanakan bimtek secara konsisten kepada kab/kota

- Memperbanyak Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan melalui kegiatan "Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman" (PPSP)
- Melakukan advokasi kepada kepala daerah di Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Akses Sanitasi Layak tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan banyak berada di Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi hanya lebih kepada pembinaan
- Sumber pembiayaan dari APBN lebih kepada operasional, rehab, optimalisasi IPLT eksisting
- Keterbatasan anggaran di Kabupaten/Kota
- Kecilnya rasio anggaran di Kabupaten/Kota untuk program sanitasi

Upaya yang dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak di masa yang akan datang ialah dengan melakukan advokasi kepada tim anggaran legislatif tentang program strategi sanitasi.

Jika dibandingkan dengan Akses Sanitasi Layak Tingkat Nasional berdasarkan data dari Susenas yang di olah oleh Bappenas diketahui bahwa Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak pada Tingkat nasional sebesar 82,36 % sedangkan capaian secara provinsi telah mencapai 84,95% Dimana capaian Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dari pada Capaian secara Nasional.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Persentase Akses Sanitasi Dengan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2022)		DEVIASI (%)
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Akses Sanitasi Layak	84,95	82,36	+2,59

Terdapat beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Akses Sanitasi Layak yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Akses Sanitasi Layak

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	584.232.907,00	577.305.597,00	98,81
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	584.232.907,00	577.305.597,00	98,81
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	436.796.907,00	434.483.456,00	99,47
Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	147.436.000,00	142.822.141,00	96,87
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	500.185.990,00	383.075.080,00	76,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	500.185.990,00	383.075.080,00	76,59
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	500.185.990,00	383.075.080,00	76,59
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	530.305.500,00	383.075.080,00	72.24
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	530.305.500,00	383.075.080,00	72.24
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	530.305.500,00	383.075.080,00	72.24

Dalam memenuhi sasaran Meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Sanitasi yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di Kabupaten/Kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan sanitasi di daerah. Untuk menghitung Tingkat efisiensi penggunaa sumber

daya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$
$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(584.232.907 \times 101.13\%) - 577.305.597}{(584.232.907 \times 101.13\%)} \times 100$$
$$\text{Tingkat Efisiensi} = 2.29\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan Tingkat Efisiensi diatas dapat di sampaikan bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak yang ditetapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah berhasil melakukan efisien sebesar 2,29% dalam penggunaan anggaran sebanyak Rp. 577.305.597,00 dari Rp. 584.232.907,00.-

6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis

❖ Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sehingga, Bangunan strategis adalah bangunan yang kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Bappeda dan Biro Organisasi telah melakukan rapat untuk pembahasan target – target IKU pada RPJM 2021 – 2026 yang tidak akan tercapai pada tanggal 29 September 2023 di Ruang Rapat Kepala Bidang P2EPD. Ada beberapa target termasuk target pada

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yaitu Persentase Bangunan Strategis Terbangun dilakukan perubahan karena target pada IKU tersebut terlalu tinggi. Persentase Bangunan Strategis terbangun dihitung berdasarkan jumlah bangunan strategis terbangun, total bangunan yang harus dibangun oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 – 2026 adalah 18 bangunan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar dan Persentase Bangunan Strategis terbangun dihitung berdasarkan kondisi bangunan 100 % terbangun, sedangkan penganggaran yang dilakukan/disetujui tidak dalam kondisi 100 % dibangun (dibangun bertahap) sehingga target pada Persentase Bangunan Strategis Terbangun diubah dari 55,55% menjadi 6% ditahun 2023. Dasar pengambilan target 2023 adalah mengacu pada RPJMD dan juga mempertimbangkan realisasi tahun 2022, perbaikan cara perhitungan target di RPJMD dan ketersediaan anggaran . Total bangunan yang harus dibangun oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 – 2026 adalah 18 bangunan yang terdiri dari: 1) Gedung Budaya, 2) Perkimtan, 3) Limbah B3, 4) Gedung MUI, 5) Inspektorat, 6) Gedung PPIPTEK, 7) Shelter Sasak, 8) Shelter SLBN 2 Padang, 9) Shelter Sikabalu, 10) Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis, 11) Shelter MTs Darul Hikmah, 12) Shelter Maligi, 13) Shelter Tanjung Mutiara, 14) TTIC Pasaman Barat, 15) Main Stadium, 16) Amphitheater Puncak Paku, 17) Amphitheater Pagaruyung, 18) Shelter Linggar Jati. Jumlah bangunan yang telah dibangun sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1 (satu) bangunan Shelter Linggar Jati. Sehingga Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat dihitung secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah Bangunan Gedung Strategis} \\
 \text{Bangunan Strategis} & = & \frac{\text{yamn Sudah dibangun}}{\text{Jumlah Total Bangunan Strategis}} \times 100\% \\
 \text{Terbangun} & & \\
 & & \\
 & & = \frac{1}{18} \times 100\% \\
 \text{Persentase} & = & 6\% \\
 \text{Bangunan Strategis} & &
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2023 untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun ialah sebesar 6%.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023. Untuk menghitung perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{6\%}{6\%} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.26 Target dan Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun di Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6%	6%	100%

Sumber data : Bidang Cipta Karya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan pencapaian target sebesar 100%, maka klasifikasi penilaian untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat diindikasikan sebagai **Sangat Tinggi**.

Untuk perbandingan realisasi kinerja & capaian dengan Tahun Lalu dilakukan untuk menunjukkan capaian yang telah diraih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan capaian. Realisasi kinerja dan capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun pada tahun 2021, 2022 & 2023 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.27 Realisasi Kinerja & Capaian Presentase Bangunan Strategis Terbangun tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	-	40,22	6	-	6	6	-	14,92	100

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun baru ada pada tahun 2023. Dengan target kinerja sebesar 6%, realisasi kinerja yang dapat dicapai ialah sebesar 6% dan capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat diukur dengan cara menghitung persentase capaian, yaitu membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan dikali 100%.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2023	REALISASI s/d 2023	CAPAIAN	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	6 %	6 %	100%	11 %

Dengan realisasi sebesar 6%, maka dapat disimpulkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun beberapa Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran, antara lain:

- Menyiapkan dokumen perencanaan Bangunan Gedung (DED, Dokling, dan FS);
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan bangunan strategis tersebut;
- Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses pembangunan;

Berdasarkan rapat untuk pembahasan target – target IKU pada RPJM 2021 – 2026 yang tidak akan tercapai pada tanggal 29 September 2023 di Ruang Rapat Kepala Bidang P2EPD oleh Bappeda dan Biro Organisasi target pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yaitu Persentase Bangunan Strategis Terbangun

dilakukan perubahan karena target pada IKU tersebut terlalu tinggi, target tersebut berubah dari 55,55% menjadi 6% dengan pertimbangan realisasi tahun 2022, perbaikan cara perhitungan target di RPJMD dan ketersediaan anggaran.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk Peningkatan Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun ialah sebagai berikut:

- Mengupayakan Penganggaran bangunan Gedung dilakukan dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap;
- Menyesuaikan alokasi pendanaan dengan rencana penyelesaian Bangunan Gedung;
- Untuk menutup timpangnya usulan dengan alokasi dana Pemprov Sumbar perlu untuk mengoptimalkan pengusulan pola pendanaan-pendanaan lainnya.

Pada tahun 2023, untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis mendapatkan alokasi anggaran berjumlah Rp 79.752.862.195,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 64.504.362.801,00. Untuk menghitung Tingkat efisiensi penggunaa sumber daya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$
$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(79.752.862.195 \times 100\%) - 64.504.362.801}{(79.752.862.195 \times 100\%)} \times 100$$
$$\text{Tingkat Efisiensi} = 19,12\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan Tingkat Efisiensi diatas dapat di sampaikan bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis yang ditetapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah berhasil melakukan efisien sebesar 19,12% dalam penggunaan anggaran sebanyak Rp. 577.305.597,00 dari Rp. 584.232.907,00.-

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan pendukungnya yaitu Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Bangunan Strategis Terbangun

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79.752.862.195,00	64.504.362.801,00	80,88
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	79.752.862.195,00	64.504.362.801,00	80,88
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	69.155.012.092,00	54.023.988.400,00	78,12
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10.197.215.923,00	10.107.207.593,00	99,12
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	179.049.500,00	154.798.320,00	86,46
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	72.051.500,00	71.897.497,00	99,79
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi UPTD P2BG	149.533.180,00	146.470.991,00	97,95

❖ **Indikator Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis**

Kawasan strategis merupakan kawasan, tempat, lokasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa serta merupakan sumber pendanaan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan strategis yang menjadi kewenangan dalam pelaksanaan program/kegiatan

oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat yaitu Gunung Talang Bukit Cambai, Masjid Raya, Museum PDRI, Kawasan Budaya, Museum dan IPTEK, dan RTH (Perbatasan Sumbar-Riau di Kabupaten 50 Kota, Perbatasan Sumbar-Jambi di Kabupaten Dharmasraya, Perbatasan Sumbar-Sumut di Kabupaten Pasaman, Perbatasan Sumbar-Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan, Perbatasan Sumbar-Jambi di Kabupaten Pesisir Selatan, Perbatasan Sumbar-Jambi di Kabupaten Solok Selatan, Perbatasan Sumbar-Riau di Kabupaten Sijunjung, dan Perbatasan Sumbar-Sumut di Kabupaten Pasaman Barat). Di dalam penyusunan dokumen RPJMD 2021-2026, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai target Kawasan Strategis dengan menargetkan capaian sebesar 40% pada tahun 2023 dengan dasar penetapan target berdasarkan jumlah kawasan yang harus tertata di RPJMD yaitu sebanyak 5 kawasan (Gn Talang Bukit Cambai; Masjid Raya; RTH; kawasan Museum PDRI; dan Kawasan Budaya, museum & IPTEK). dengan target tiap tahun 1 kawasan tertata. Pada tahun 2023 Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tidak ada melakukan penataan bangunan pada kawasan strategis karena kurangnya kemampuan fiskal provinsi untuk menyelesaikan penataan kawasan, namun Pada Tahun 2023 upaya yang telah dilakukan adalah dengan penyusunan Masterplan Kawasan GOR H. Agus Salim yang merupakan salah satu kawasan strategis. Untuk capaian yang telah dilakukan penataan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2023 ialah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kab. 50 Kota, sehingga Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis dapat dihitung secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Penataan} & & \text{Jumlah kawasan strategis yang ditata} \\
 \text{Bangunan pada} & = & \frac{\text{bangunan dan lingkungannya}}{\text{Jumlah total kawasan strategis}} \times 100\% \\
 \text{Kawasan Strategis} & & \\
 & = & \frac{1}{40} \times 100\% \\
 \text{Persentase Penataan} & & \\
 \text{Bangunan pada} & = & 2,5 \% \\
 \text{Kawasan Strategis} & &
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja yang dicapai hingga tahun 2023 untuk Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis ialah baru sebesar 2,5% ini dikarenakan tidak adanya Kegiatan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada tahun 2023.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra dengan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2023. Untuk menghitung perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{2,5\%}{40\%} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= 6.25 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.30 Target dan Capaian Indikator Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis di Sumatera Barat s/d Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	40%	2.5%	6.25%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat capaian realisasi kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,5%. Dengan pencapaian target sebesar 6,25%, maka klasifikasi penilaian untuk Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis dapat diindikasikan sebagai Sangat Rendah. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai target kinerja dari Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada tahun 2023 ini, telah didukung dengan menyiapkan dokumen perencanaan Bangunan Gedung (Masterplan, DED, Dokling, dan FS) sehingga dapat terealisasi sebesar 2,5%.

Untuk perbandingan realisasi kinerja & capaian dengan Tahun Lalu dilakukan untuk menunjukkan capaian yang telah diraih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan capaian. Realisasi kinerja dan capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis pada tahun 2021, 2022 & 2023 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.31 Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	-	20	40	-	2,5	2,5	-	12,5	6,25

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2023	REALISASI s/d 2023	CAPAIAN	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	40 %	2,5 %	6,25%	100 %

Dengan realisasi sebesar 2,5% dan target hingga akhir renstra 100%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi yang akan dicapai sangat jauh untuk tercapai pada akhir renstra yang telah ditetapkan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar telah melakukan beberapa Upaya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran pada tahun 2023, antara lain:

- Telah menyiapkan dokumen perencanaan Bangunan Gedung (Masterplan, DED, Dokling, dan FS)
- Pada Tahun 2023, telah dilakukan penyusunan Masterplan Kawasan GOR H. Agus Salim yang merupakan salah satu kawasan strategis.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis

didukung oleh Program Penataan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan pendukungnya yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	879.443.253,00	817.135.109,00	92,92
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	879.443.253,00	817.135.109,00	92,92
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	336.795.500,00	315.137.720,00	93,57
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	221.555.233,00	214.005.037,00	96,59
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota UPTD P2BG	321.092.520,00	287.992.352,00	89,69

7. Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan

Indikator dalam Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan adalah terkait capaian persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi Sumatera Barat. Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dapat ditentukan dengan membandingkan aspek muatan RPJMD tahun berjalan dengan muatan program RTRW, seperti Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah; Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi

daerah; dan Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya). Perhitungan nilai persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dengan cara membandingkan Jumlah Program RTRW dan Jumlah Program RPJMD Yang Sesuai Dengan RTRW, yang mana dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi} &= \frac{\text{Jumlah implementasi program RPJMD yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah indikasi program RTRW}} \times 100\% \\ &= \frac{22}{25} \times 100\% \\ \text{\% Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi} &= 88\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2023 untuk Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi di atas, kemudian dapat dihitung capaian kinerjanya dengan cara membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi tahun berjalan (87 % untuk tahun 2023). Perhitungan nilai capaian kinerja secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{88\%}{87\%} \times 100\% \\ \text{\% Capaian Kinerja} &= 101,14\% \end{aligned}$$

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	87%	88%	101,14%

Dengan pencapaian target sebesar 100,86%, maka klasifikasi penilaian untuk persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi adalah **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.34 Daftar Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi T.A 2023

NO	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	INDIKATOR KINERJA			TARGET		REALISASI : (22)/(25) *100= 88%
		PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017-2021	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW (I + II = 25)	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW (I+II=22)	
<i>I</i>	<i>Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang</i>						
<i>A</i>	<i>Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat</i>				6	5	
1	Pemantapan Fungsi Kota PKN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Sesuai	Dinas Perhubungan	1	1	
2	Pemantapan Fungsi Kota PKW	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
3	Pengembangan dan Penataan PKN	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
4	Pengembangan PKW dan PKWp	Program Peningkatan PBLUD RSUD	Sesuai	Dinas Kesehatan	1	1	
5	Pengembangan PKL	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
6	Penyusunan Renstra				1		
<i>B</i>	<i>Program Perwujudan Sistem Prasarana</i>				3	3	
1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
2	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sesuai	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air	1	1	

NO	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	INDIKATOR KINERJA			TARGET		REALISASI : (22)/(25) *100= 88%
		PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017-2021	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW (I + II = 25)	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW (I+II=22)	
3	Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
II	Program Perwujudan Pola Ruang						
A	Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung				4	4	
1	Pengembangan Kawasan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Sesuai	Dinas Kehutanan	1	1	
2	Pemantapan Kawasan Lindung	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Sesuai	Dinas Kehutanan	1	1	
3	Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Sesuai	Dinas Kehutanan	1	1	
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Sesuai	BPBD	1	1	
B	Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya				10	8	
1	Pengembangan kawasan permukiman				1		
	- pengembangan kawasan permukiman perdesaan						
	- pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan perumahan	Sesuai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		1	
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian	Sesuai	Dinas Pertanian	1	1	

NO	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	INDIKATOR KINERJA			TARGET		REALISASI : (22)/(25) *100= 88%
		PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017-2021	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW (I + II = 25)	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW (I+II=22)	
3	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan	Sesuai	Dinas Perkebunan	1	1	
4	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan	Sesuai	Dinas Peternakan	1	1	
5	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Sesuai	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	
6	Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Sesuai	Dinas ESDM	1	1	
7	Program Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Sesuai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	
8	Program Pengembangan Pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Sesuai	Dinas Pariwisata	1	1	
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya				1		
10	Penyusunan SPM				1		
C	Program Perwujudan Kawasan Strategis				2	2	
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	Perencanaan penataan ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	
2	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi pada tahun 2021, 2022 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan Rencana Tata Ruang tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	86	86	87	86	86	88	100,00	100,00	101,14

Sumber data : LAKIP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dari tahun 2021 s/d 2023 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi pada tahun 2023 ialah sebesar 87%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi s/d 2023 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2023	TARGET s/d 2023	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	88%	87%	90%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi sampai dengan 2023 sebesar 88% dan 97,77% terhadap target Akhir Periode Renstra. Diharapkan dengan upaya yang maksimal, target Renstra dapat dicapai pada tahun 2026.

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat dijelaskan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja tersebut dapat dicapai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas, yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana Tata Ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program di antara kedua dokumen perencanaan. Adapun fungsi Rencana Tata Ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif. Belum ada kendala yang signifikan. Saat ini masih menunggu proses revisi RTRW Provinsi sehingga perhitungan persentase kesesuaian masih mengacu pada Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dimasa datang untuk meningkatkan dan menjaga capaian indikator kinerja adalah dengan Percepatan penetapan revisi RTRW provinsi menjadi Peraturan Daerah.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.37 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE KEUANGAN(%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.408.250.750,00	1.069.499.741,00	75,95
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	371.758.000,00	354.861.741,00	95,46
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	274.000.000,00	267.471.331,00	97,62
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	97.758.000,00	87.390.410,00	89,39
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	212.983.300,00	190.918.815,00	89,64
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	143.135.300,00	126.980.261,00	88,71
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	69.848.000,00	63.938.554,00	91,54
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	274.162.000,00	166.492.441,00	60,73
Sistem Informasi Penataan Ruang	274.162.000,00	166.492.441,00	60,73
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	549.347.450,00	357.226.744,00	65,03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	174.112.700,00	150.340.882,00	86,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	179.157.750,00	64.449.663,00	35,97
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	64.615.800,00	43.225.711,00	66,90
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	131.461.200,00	99.210.488,00	75,47
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.408.250.750,00	1.069.499.741,00	75,95

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan pagu dana sekitar Rp. 1.408.250.750,00 yang mana melalui Bidang Tata Ruang telah mampu melaksanakan program/kegiatan dengan serapan dana sebesar 1.069.499.741,00 atau 75,95% dari alokasi anggaran yang diberikan. Untuk

menghitung Tingkat efisiensi penggunaa sumber daya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK .02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(1.408.250.750 \times 101,14\%) - 1.069.499.741}{(1.408.250.750 \times 101,14\%)} \times 100$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 24,91\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan Tingkat Efisiensi diatas dapat di sampaikan bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah berhasil melakukan efisien sebesar 24.91% dalam penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.069.499.741,00 dari Rp. 1.408.250.750,00.-

D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan, membutuhkan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung. Adapun program dan kegiatan serta rincian pagu anggaran yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
- MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI - MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI	- NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA - TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,028,119,878	50,348,602,510	98.67	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360,778,839	344,139,593	95.39	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	155,047,125	150,108,233	96.81	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	205,731,714	194,031,360	94.31	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34,377,064,524	34,071,388,115	99.11	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33,026,487,024	32,734,672,486	99.12	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1,350,577,500	1,336,715,629	98.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	222,964,000	222,761,778	99.91	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	222,964,000	222,761,778	99.91	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,928,000	31,540,101	92.96	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	33,928,000	31,540,101	92.96	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,801,488,013	2,781,822,456	99.30	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	55,000,000	54,931,125	99.87	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	185,000,000	184,160,568	99.55	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	110,000,000	109,900,639	99.91	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	30,420,000	30,344,000	99.75	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1,743,912,360	1,735,058,590	99.49	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	46,529,200	44,613,019	95.88	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	17,501,600	17,446,500	99.69	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	84,461,928	84,152,700	99.63	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	15,000,000	14,935,500	99.57	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	84,461,928	79,911,750	94.61	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	12,500,000	12,492,400	99.94	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	85,620,928	85,385,600	99.73	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV</i>	15,000,000	14,975,200	99.83	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV</i>	122,218,713	122,115,765	99.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V</i>	12,937,500	12,920,100	99.87	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V</i>	84,461,928	84,177,550	99.66	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	12,000,000	11,970,900	99.76	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	84,461,928	82,330,550	97.48	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	423,648,570	388,040,923	91.60	Sangat Baik	99.10	Sangat Baik
		<i>Pengadaan Mebel</i>	150,000,000	148,659,500	99.11	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	273,648,570	239,381,423	87.48	Sangat Baik	98.61	Sangat Baik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,979,155,539	6,787,285,774	97.25	Sangat Baik	99.81	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	11,758,000	11,748,500	99.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	1,962,895,215	1,852,397,656	94.37	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	4,104,025,774	4,037,943,850	98.39	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	9,105,000	6,685,138	73.42	Baik	73.42	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	141,575,048	141,575,048	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	23,805,000	16,297,608	68.46	Cukup	68.46	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	141,575,048	141,575,048	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	14,547,000	12,187,945	83.78	Baik	83.78	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	141,575,048	141,575,048	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV</i>	6,600,000	5,732,056	86.85	Sangat Baik	86.85	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV</i>	106,181,286	106,181,286	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V</i>	19,400,000	17,644,908	90.95	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V</i>	141,575,048	141,575,048	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	12,963,024	12,591,587	97.13	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	141,575,048	141,575,048	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,829,092,393	5,721,623,770	98.16	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	879,789,086	862,770,675	98.07	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	939,970,000	926,822,040	98.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	3,139,883,507	3,064,404,155	97.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Workshof dan Peralatan</i>	869,449,800	867,626,900	99.79	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
MENINGKATNYA CAKUPAN AIR MINUM	PRESENTASE CAKUPAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	979,393,380	488,456,042	49.87	Kurang	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	979,393,380	488,456,042	49.87	Kurang	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</i>	885,001,600	421,663,137	47.65	Kurang	100.00	Sangat Baik
		<i>Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota</i>	94,391,780	66,792,905	70.76	Baik	100.00	Sangat Baik
MENINGKATNYA CAKUPAN SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	584,232,907	577,305,597	98.81	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	584,232,907	577,305,597	98.81	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</i>	436,796,907	434,483,456	99.47	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</i>	147,436,000	142,822,141	96.87	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	500,185,990	383,075,080	76.59	Baik	100.00	Sangat Baik
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	500,185,990	383,075,080	76.59	Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</i>	500,185,990	383,075,080	76.59	Baik	100.00	Sangat Baik
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	530,305,500	383,075,080	72.24	Cukup	100.00	Sangat Baik
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	530,305,500	383,075,080	72.24	Cukup	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya</i>	530,305,500	383,075,080	72.24	Cukup	100.00	Sangat Baik
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN GEDUNG STRATEGIS	PERSENTASE BANGUNAN STRATEGIS TERBANGUN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79,752,862,195	64,504,362,801	80.88	Baik	95.11	Sangat Baik
		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	79,752,862,195	64,504,362,801	80.88	Baik	95.11	Sangat Baik
		<i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	69,155,012,092	54,023,988,400	78.12	Baik	94.36	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	10,197,215,923	10,107,207,593	99.12	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi</i>	179,049,500	154,798,320	86.46	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara</i>	72,051,500	71,897,497	99.79	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi UPTD P2BG</i>	149,533,180	146,470,991	97.95	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN GEDUNG STRATEGIS	PERSENTASE PENTAAN BANGUNAN PADA KAWASAN STRATEGIS	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	879,443,253	817,135,109	92.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	879,443,253	817,135,109	92.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	336,795,500	315,137,720	93.57	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</i>	221,555,233	214,005,037	96.59	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota IPTD P2BG</i>	321,092,520	287,992,352	89.69	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN	RASIO KEMANTAPAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	199,525,277,485	197,045,831,669	98.76	Sangat Baik	99.89	Sangat Baik
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	199,525,277,485	197,045,831,669	98.76	Sangat Baik	99.89	Sangat Baik
		<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	5,738,381,087	5,715,594,528	99.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan</i>	3,550,417,894	3,468,354,626	97.69	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pengelolaan Leger Jalan</i>	974,715,000	954,464,632	97.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	549,461,500	546,002,148	99.37	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pembangunan Jalan</i>	42,852,938,982	42,568,800,059	99.34	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	22,309,892,625	22,064,715,541	98.90	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pelebaran Jalan Menambah Lajur</i>	4,446,847,112	4,364,332,653	98.14	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Rekonstruksi Jalan</i>	30,788,432,352	30,471,412,303	98.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Rehabilitasi Jalan</i>	28,118,438,180	27,655,564,480	98.35	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pembangunan Jembatan</i>	7,838,140,393	7,143,258,550	91.13	Sangat Baik	97.10	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Penggantian Jembatan</i>	10,697,859,223	10,654,859,549	99.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat</i>	78,627,250	78,113,889	99.35	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	594,366,640	589,814,808	99.23	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	82,662,400	82,216,219	99.46	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	400,000,000	397,734,994	99.43	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	7,021,056,424	7,000,051,796	99.70	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I</i>	320,600,000	320,382,200	99.93	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	904,130,939	902,223,500	99.79	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	5,956,771,113	5,850,140,884	98.21	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II</i>	247,291,972	246,514,610	99.69	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	968,104,209	968,092,077	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	4,507,605,815	4,496,425,180	99.75	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III</i>	61,397,000	61,381,400	99.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV</i>	5,834,118,960	5,825,052,784	99.84	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV</i>	286,581,041	286,176,637	99.86	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V</i>	4,883,885,827	4,883,227,478	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V</i>	83,599,697	82,626,000	98.84	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Berkala Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	501,000,000	483,022,000	96.41	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	5,696,000,000	5,689,229,617	99.88	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI</i>	164,500,000	164,338,900	99.90	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat UPTD Workshop dan Peralatan</i>	1,191,847,900	1,169,249,217	98.10	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan UPTD Workshop dan Peralatan</i>	673,254,950	662,277,693	98.37	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan UPTD Laboratorium dan Bahan</i>	1,202,351,000	1,200,180,717	99.82	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW PROVINSI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,408,250,750	1,069,499,741	75.95	Baik	85.19	Sangat Baik
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	371,758,000	354,861,741	95.46	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi</i>	274,000,000.00	267,471,331.00	97.62	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang</i>	97,758,000.00	87,390,410.00	89.39	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaa tata ruang	212,983,300	190,918,815	89.64	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi</i>	143,135,300	126,980,261	88.71	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
		<i>Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota</i>	69,848,000	63,938,554	91.54	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI REALIASASI (%)	KINERJA KEUANGAN	PERSENTASI FISIK (%)	KINERJA FISIK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	274,162,000	166,492,441	60.73	Cukup	52.50	Sangat Baik
		<i>Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	274,162,000	166,492,441	60.73	Cukup	52.50	Kurang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	549,347,450	357,226,744	65.03	Cukup	85.74	Sangat Baik
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang</i>	174,112,700	150,340,882	86.35	Sangat Baik	55.00	Cukup
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang</i>	179,157,750	64,449,663	35.97	Buruk	100.00	Sangat Baik
		<i>Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>	64,615,800	43,225,711	66.90	Cukup	100.00	Sangat Baik
		<i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	131,461,200	99,210,488	75.47	Baik	100.00	Sangat Baik

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LKjIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: dari 9 (Sembilan) program, meliputi: 19 (Sembilan Belas) Kegiatan serta 103 (Seratus Tiga) Sub Kegiatan pada tahun 2023, dari capaian kinerja fisik diketahui bahwa ke 19 (Sembilan Belas) program terlaksana dengan kinerja sangat baik.

Untuk capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	REALIASI TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 73.70%	B 61.59%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	73.70%	88.50 %
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio kemantapan jalan	77 %	67.99 %
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84 %	85.58 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023	REALIASI TAHUN 2023
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84 %	84.95 %
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis terbangun	6 %	6 %
7.	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan Berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	87.00 %	88 %

Dari 7 (tujuh) Indikator pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 terdapat 2 (dua) Indikator yang capaiannya tidak memenuhi target yaitu: 1). Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan realisasi kinerja sebesar 61,59% dan 2). Rasio Kemantapan Jalan sebesar 67,99%.

Penilaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi pada Tahun 2023 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan capaian keuangan diketahui bahwa kinerja Dinas BMCKTR berada pada prediket penilaian "**sangat baik**", sementara dari capaian realisasi fisik berada pada predikat "**sangat baik**". Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk semua paket pekerjaan terutama paket lelang agar pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi paket pekerjaan yang dilaksanakan melewati Tahun Anggaran yang nantinya akan berefek pada rendahnya serapan keuangan seperti yang terjadi pada Tahun 2023 ini.
2. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.